

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Grafik	ii
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Maksud	I-1
1.2 Tujuan	I-1
1.3 Dasar Pertimbangan	I-2
1.4 Ruang Lingkup	I-2
1.5 Sistematika Dokumen	I-2
BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2018.....	II-1
2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2018	II-1
2.2 Evaluasi RPJMD Tahun 2014-2019	II-3
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-17
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan	IV-4
4.3 Program Pembangunan Daerah Tahun 2018.....	IV-17
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	IV-1

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Capaian LPE Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2016 dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017.....	III-2
Grafik 3.2 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ciamis Capaian Tahun 2015-2016 dan Estimasi Tahun 2017 Menurut Kategori (AdHB) ..	III-3
Grafik 3.3 Gini Rasio Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017	III-6
Grafik 3.4 Laju Inflasi Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017	III-6

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019	III-10
Gambar 4.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional	IV-16

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Capaian Rata-rata RKPD Kabupaten Ciamis pada Triwulan II Tahun 2018 berdasarkan Pelaksanaan Bidang Urusan	II-2
Tabel 2.2	Realisasi RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Tahun 2018 sesuai dengan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2018	II-4
Tabel 2.3	Tingkat Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Triwulan II Tahun 2018	II-6
Tabel 2.4	Rekomendasi Program dan Kegiatan untuk Perubahan RKPD Tahun 2018	II-11
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ciamis Capaian Tahun 2015-2016 dan Estimasi Tahun 2017 (%)	III-2
Tabel 3.2	PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku Capaian Tahun 2015-2016 dan Estimasi Tahun 2017 Menurut Kategori (Juta Rupiah)	III-4
Tabel 3.3	Capaian PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2016 dan Estimasi Tahun 2017 (Juta Rupiah)	III-5
Tabel 3.4	Indikator Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017	III-9
Tabel 3.5	Proyeksi Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2018-2019	III-10
Tabel 3.6	Perkiraan Indikator Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2019	III-15
Tabel 3.7	Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018	III-18
Tabel 3.8	Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018	III-20
Tabel 3.9	Kondisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018	III-21
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
Tabel 4.2	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 ...	IV-16
Tabel 4.3	Penjelasan Program Pembangunan	IV-23
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 per OPD	V-2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 18 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 JULI 2018
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
CIAMIS TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2017. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dan juga merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru serta perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

1.2. Tujuan

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2018;
3. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.3. Dasar Pertimbangan

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran 2017 (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun 2018;
3. Adanya pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, dan perubahan indikator kinerja, target, lokasi serta pagu kegiatan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perubahan RKPD Tahun 2018, meliputi:

1. Perubahan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Perubahan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
3. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

1.5. Sistematika Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018, sebagai pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2018;
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- BAB VI Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2018

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja, daya serap anggaran, serta identifikasi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Renja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Capaian target RKPD merupakan akumulasi dari capaian kinerja Renja OPD pada tahun berkenaan. Selanjutnya, capaian target tahunan (RKPD dan Renja OPD) menjadi sumber data untuk mengukur capaian target rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD). Tingkat capaian RKPD diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2018

Disamping untuk mengetahui tingkat capaian kinerja program/kegiatan dengan melakukan evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2018 juga dilakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. Hasil pengendalian dan evaluasi Triwulan II dimaksud, telah diklarifikasi dengan setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Hasil pengendalian dan evaluasi telah disempurnakan oleh seluruh OPD bersama-sama dengan Bappeda, sehingga hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2018 diharapkan lebih baik dan telah sesuai dengan dokumen yang ada, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai gambaran pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ciamis s.d. Triwulan II Tahun 2018.

Berdasarkan data evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II, rata-rata capaian RKPD Kabupaten Ciamis dari sejumlah 170 program yang dilaksanakan adalah 18,30% (sangat rendah) untuk rata-rata capaian kinerja fisik, sedangkan rata-rata capaian kinerja keuangan adalah 24,12% (sangat rendah). Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RKPD dimaksud seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Capaian Rata-rata RKPD Kabupaten Ciamis pada Triwulan II Tahun 2018 berdasarkan Pelaksanaan Bidang Urusan

No.	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	CAPAIAN RKPD			
				s.d. Triwulan II 2018 (%)			
				Kinerja Fisik (%)	Predikat Kinerja	Kinerja Keuangan (Rp)	Predikat Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	48	325	12,63	(Sangat Rendah)	19,52	(Sangat Rendah)
1.01	Pendidikan	5	86	23,32	(Sangat Rendah)	42,63	(Sangat Rendah)
1.02	Kesehatan	16	54	14,73	(Sangat Rendah)	27,93	(Sangat Rendah)
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	120	4,11	(Sangat Rendah)	3,49	(Sangat Rendah)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	20	36,40	(Sangat Rendah)	25,40	(Sangat Rendah)
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5	32	61,05	(Rendah)	64,85	(Rendah)
1.06	Sosial	4	13	54,85	(Rendah)	46,38	(Sangat Rendah)
2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	47	241	37,83	(Sangat Rendah)	28,07	(Sangat Rendah)
2.01	Tenaga Kerja	4	15	29,59	(Sangat Rendah)	30,53	(Sangat Rendah)
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	8	50,23	(Rendah)	36,73	(Sangat Rendah)
2.03	Pangan	1	24	21,82	(Sangat Rendah)	44,59	(Sangat Rendah)
2.04	Pertanahan	1	2	28,10	(Sangat Rendah)	32,88	(Sangat Rendah)
2.05	Lingkungan Hidup	6	23	31,43	(Sangat Rendah)	21,87	(Sangat Rendah)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	13	54,61	(Rendah)	36,15	(Sangat Rendah)
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	25	46,66	(Sangat Rendah)	48,54	(Sangat Rendah)
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	19	81,66	(Tinggi)	35,75	(Sangat Rendah)
2.09	Perhubungan	6	28	7,37	(Sangat Rendah)	9,38	(Sangat Rendah)
2.1	Komunikasi dan Informatika	2	11	49,29	(Sangat Rendah)	40,85	(Sangat Rendah)
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	6	63,96	(Rendah)	44,61	(Sangat Rendah)
2.12	Penanaman Modal	2	8	45,55	(Sangat Rendah)	40,91	(Sangat Rendah)
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	5	19	23,91	(Sangat Rendah)	24,39	(Sangat Rendah)
2.14	Statistik	1	5	58,93	(Rendah)	71,55	(Sedang)
2.15	Persandian	1	3	25,98	(Sangat Rendah)	13,92	(Sangat Rendah)
2.16	Kebudayaan	2	8	44,42	(Sangat Rendah)	47,04	(Sangat Rendah)
2.17	Perpusatkaan	1	12	10,88	(Sangat Rendah)	13,62	(Sangat Rendah)
2.18	Kearsipan	3	12	29,58	(Sangat Rendah)	44,82	(Sangat Rendah)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	21	88	26,71	(Sangat Rendah)	16,72	(Sangat Rendah)
3.01	Kelautan dan Perikanan	3	11	2,20	(Sangat Rendah)	1,55	(Sangat Rendah)
3.02	Pariwisata	4	13	60,16	(Rendah)	40,12	(Sangat Rendah)
3.03	Pertanian	9	39	12,11	(Sangat Rendah)	17,54	(Sangat Rendah)
3.04	Perdagangan	2	17	41,73	(Sangat Rendah)	11,09	(Sangat Rendah)
3.05	Perindustrian	1	4	94,39	(Sangat Tinggi)	75,19	(Tinggi)
3.06	Transmigrasi	2	4	56,42	(Rendah)	45,56	(Sangat Rendah)

No.	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	CAPAIAN RKPD			
				s.d. Triwulan II 2018 (%)			
				Kinerja Fisik (%)	Predikat Kinerja	Kinerja Keuangan (Rp)	Predikat Kinerja
4	Penunjang Urusan Pemerintahan	11	132	35,47	(Sangat Rendah)	31,71	(Sangat Rendah)
4,01	Perencanaan	4	24	27,18	(Sangat Rendah)	31,24	(Sangat Rendah)
4,02	Keuangan	1	61	29,30	(Sangat Rendah)	29,30	(Sangat Rendah)
4,03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	3	34	39,06	(Sangat Rendah)	24,67	(Sangat Rendah)
4,04	Penelitian dan Pengembangan	1	3	0,00	(Sangat Rendah)	24,86	(Sangat Rendah)
4,05	Pengawasan	2	10	67,82	(Sedang)	47,15	(Sangat Rendah)
5	Pendukung	16	74	17,34	(Sangat Rendah)	37,92	(Sangat Rendah)
5,01	Sekretariat Daerah	15	67	12,87	(Sangat Rendah)	37,00	(Sangat Rendah)
5,02	Sekretariat DPRD	1	7	22,51	(Sangat Rendah)	38,99	(Sangat Rendah)
6	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2	5	40,32	(Sangat Rendah)	30,72	(Sangat Rendah)
6,01	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2	5	40,32	(Sangat Rendah)	30,72	(Sangat Rendah)
7	Kewilayahan	1	189	43,14	(Sangat Rendah)	47,50	(Sangat Rendah)
7,01	Kecamatan	1	189	43,14	(Sangat Rendah)	47,50	(Sangat Rendah)
8	Non Urusan	5	1187	34,09	(Sangat Rendah)	47,98	(Sangat Rendah)
8,01	Non Urusan	5	1187	34,09	(Sangat Rendah)	47,98	(Sangat Rendah)
JUMLAH 1 + 2		151	2241	18,30	(Sangat Rendah)	24,12	(Sangat Rendah)

Persentase capaian kinerja untuk pelaksanaan program kegiatan dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Triwulan II berdasarkan urusan, persentase realisasi fisik tertinggi dicapai oleh urusan Perindustrian sebesar 94,39% dan persentase realisasi fisik terendah yaitu urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar 0,00%; sedangkan persentase realisasi keuangan tertinggi dicapai oleh urusan Perindustrian sebesar 75,19%, sedangkan persentase realisasi keuangan terendah yaitu urusan Kelautan dan Perikanan sebesar 1,55%.

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa hampir seluruh urusan dan non urusan capaian persentase realisasi anggarannya masih dibawah 50% (sangat rendah), yang semestinya ditargetkan mencapai 50%, bahkan terdapat 4 urusan yang capaian persentase realisasi fisik dan anggarannya dibawah 10% yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; urusan Perhubungan; urusan Kelautan dan Perikanan; serta urusan Penelitian dan Pengembangan.

2.2. Evaluasi RPJMD Tahun 2014-2019

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2014, dengan pelaksanaan RKPD tahun 2014 s.d. tahun 2019. Sedangkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2017, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018.

Dalam pengendalian dan evaluasi RPJMD maupun Renstra OPD, berdasarkan analisis terhadap Renstra OPD, ditemukan bahwa pagu indikatif Renstra OPD untuk tahun 2018 tidak sesuai dengan RPJMD.

2.2.1. Realisasi Anggaran RPJMD

Realisasi anggaran RPJMD merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam RKPD selama 5 tahun. Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan.

Realisasi RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Tahun 2018 sesuai dengan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Realisasi RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Tahun 2018 sesuai dengan hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2018

No.	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif (RPJMD)	Realisasi Pagu Anggaran (RKPD)	
		Rp.	Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	256.706.889.268,00	429.829.440.861,00	167,44
1.01	Pendidikan	35.052.469.450,00	13.665.000.000,00	38,98
1.02	Kesehatan	139.864.197.565	169.850.000.000,00	121,44

No.	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif (RPJMD)	Realisasi Pagu Anggaran (RKPD)	
		Rp.	Rp.	%
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.377.131.203	203.641.434.861,00	331,79
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.059.921.750	24.939.000.000,00	247,90
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.063.183.800	15.969.006.000,00	176,20
1.06	Sosial	1.289.985.500	1.765.000.000,00	136,82
2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	79.453.109.880,00	45.396.124.100,00	57,14
2,01	Tenaga Kerja	471.387.000	943.850.000	200,23
2,02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	862.188.000	2.000.000.000	231,97
2,03	Pangan	1.990.059.000	2.670.804.500	134,21
2,04	Pertanahan	40.591.606.930	800.000.000	1,97
2,05	Lingkungan Hidup	10.864.287.000	7.224.400.000	66,50
2,06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.680.929.500	4.037.094.000	240,17
2,07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.792.385.150	3.801.000.000	136,12
2,08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.191.630.000	3.700.000.000	40,25
2,09	Perhubungan	5.390.944.000	4.650.000.000	86,26
2,1	Komunikasi dan Informatika	361.395.000	1.175.000.000	325,13
2,11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	290.000.000	620.000.000	213,79
2,12	Penanaman Modal	539.097.500	2.400.000.000	445,19
2,13	Kepemudaan dan Olahraga	1.503.351.250	3.940.000.000	262,08
2,14	Statistik	950.465.600	1.925.000.000	202,53
2,15	Persandian	1.456.766.800	1.548.975.600	106,33
2,16	Kebudayaan	0	2.260.000.000	0,00
2,17	Perpustakaan	406.750.250	1.150.000.000	282,73
2,18	Kearsipan	109.866.900	550.000.000	500,61
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	18.907.128.950	10.364.345.500	54,82
3,01	Kelautan dan Perikanan	1.632.979.000	1.575.000.000	96,45
3,02	Pariwisata	2.881.786.950	2.000.000.000	69,40
3,03	Pertanian	6.632.927.000	4.453.195.500	67,14
3,04	Perdagangan	7.087.310.000	1.555.000.000	21,94
3,05	Perindustrian	535.000.000	625.000.000	116,82
3,06	Transmigrasi	137.126.000	156.150.000	113,87
4	Penunjang Urusan Pemerintahan	35.946.065.150	36.828.561.100	102,46
4,01	Perencanaan	4.055.623.000	5.750.000.000	141,78
4,02	Keuangan	22.061.503.050	21.791.239.100	98,77
4,03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	4.517.384.100	3.262.322.000	72,22
4,04	Penelitian dan Pengembangan	232.875.000	525.000.000	225,44
4,05	Pengawasan	5.078.680.000	5.500.000.000	108,30
5	Pendukung	18.425.416.300	17.564.028.040	95,32
5,01	Sekretariat Daerah	12.171.093.800	11.064.028.040	90,90
5,02	Sekretariat DPRD	6.254.322.500	6.500.000.000	103,93
6	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	608.282.950	2.956.447.900	486,03
6,01	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	608.282.950	2.956.447.900	486,03
7	Kewilayahan	2.515.022.950	5.212.044.800	207,24

No.	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif (RPJMD)	Realisasi Pagu Anggaran (RKPD)	
		Rp.	Rp.	%
7,01	Kecamatan	2.515.022.950	5.212.044.800	207,24
8	Non Urusan	0	148.216.493.020	0,00
8,01	Non Urusan	0	148.216.493.020	0,00
JUMLAH 1 + 2		412.526.101.761	696.367.485.321	168,81

Total pagu indikatif seluruh program dalam RPJMD Tahun 2014-2019 sampai dengan tahun 2018 adalah Rp2.265.443.740.785,89, dan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pagu indikatif dalam RKPD pada tahun 2018 sejumlah Rp412.526.101.761,00, dengan pagu APBD sebesar Rp696.367.485.321,00 atau 168,81%.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, rata-rata realisasi anggaran RPJMD (realisasi pelaksanaan RKPD s.d. Triwulan II Tahun 2018) adalah 20,84%. Realisasi tersebut merupakan persentase pagu indikatif program RPJMD selama 5 tahun yang telah dilaksanakan melalui kegiatan dalam Renstra OPD. Realisasi RPJMD dipengaruhi oleh konsistennya kegiatan dalam Renstra OPD dijabarkan ke dalam Renja OPD dan lalu dianggarkan dalam APBD.

2.2.2. Tingkat Capaian RPJMD

Capaian RPJMD merupakan akumulasi hasil pelaksanaan RKPD setiap tahun. Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan.

Tingkat capaian RPJMD s.d. Triwulan II Tahun 2018 sementara, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Tingkat Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis s.d. Triwulan II Tahun 2018

NO. MISI	NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D. TAHUN 2017	TAHUN 2018			CAPAIAN KINERJA S.D. TRW II TAHUN 2018
					TARGET RPJMD	REALISASI S.D. TRW II	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)		(8)	
I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							
	1	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Indeks Pendidikan	65,63	69,36	0	0,00	101,77
			RLS	7,66	7,73	0	0,00	100
			Harapan Lama Sekolah	14,38	14,66	0	0,00	99,93
	2	Meningkatnya budaya dan minat baca	Jumlah Perpustakaan daerah & perpustakaan keliling;	341	204	341	167,16	171,36
	3	Meningkatnya layanan kesehatan	3.1 Indeks Kesehatan	78,48		0	0,00	101,12
			3.2 Angka Harapan Hidup	70,29	70,55	0	0,00	99,7

NO. MISI	NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI S.D. TAHUN 2017	TAHUN 2018			CAPAIAN KINERJA S.D. TRW II TAHUN 2018	
						TARGET RPJMD	REALISASI S.D. TRW II	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)		
			3.3	AKI	13	15	0	0,00	118,75	
			3.4	AKB	126	199	0	0,00	137	
	4	Meningkatnya kesehatan lingkungan	4.1	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100	54	0	0,00	188,68	
	5	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	5.1	LPP	0,47	0,44	0	0,00	100	
	6	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	6.3	Prestasi Pemuda Pelopor		8	0	0,00	0	
	7	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	7.3	Indeks Development Gender	85,2	85,2	0	0,00	100	
	8	Meningkatnya prestasi olahraga	8.1	Jumlah atlet berprestasi (orang)		96	0	0,00	0	
	9	Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat	9.3	Jumlah kelompok seni		56	0	0,00	0	
			9.4	Jumlah upacara adat tradisional		32	0	0,00	0	
	10	Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari	10.1	Tempat ibadah yang menerima bantuan:			0	0,00	92,55	
			-	Mesjid	-	755	0	0,00	0	
			-	Gereja	-	4	0	0,00	0	
			-	Kelenteng	-	1	0	0,00	0	
	11	Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, antar umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	11.1	Kasus berlatar belakang sara	0	0	0	100,00	100	
	12	Menurunnya tingkat kemiskinan	12.1	Jumlah penduduk miskin	96.758	83.834	0	0,00	92,99	
	13	Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan	13.1	Jumlah KDRT terhadap ibu dan anak	11	12	0	0,00	121,43	
			13.2	Persentase penanganan KDRT dan Trafficking		-			0,00	0
	14	Menurunnya PMKS	14.1	Penurunan jumlah PMKS	27.841	12.740	0		222,37	
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat									
	15	Meningkatnya kualitas SDM aparat	15.1	Kapasitas aparatur :						
				- PNS berijazah S1,S2,S3	57,68	54				108,83
	16	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi		- Penilaian SAKIP;	B	B			100	
				- Predikat penilaian LPPD;	Sangat Tinggi	Sangat tinggi			100	
				- Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP			100	
			16.4	Level Maturitas SPIP	3	3				
	17	Meningkatnya transparansi	17.1	Kepemilikan web pemerintah	Ada	1			100	
	18	Meningkatnya pelayanan masyarakat	18.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	7,91	86			100	
	19	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	19.1	Kepemilikan KTP	86	100			86	
	20	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	21.1	Tingkat Partisipasi dalam Pemilu						
				- Pemilu Legislatif		72,5	78,21			107,88
				- Pemilu Presiden						
				- Pemilu Kepala Daerah Gubernur		75	78,16	104,21		104,21
				- Pemilu Kepala Daerah Bupati		70	78,26	111,80		111,80

NO. MISI	NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI S.D. TAHUN 2017	TAHUN 2018			CAPAIAN KINERJA S.D. TRW II TAHUN 2018
						TARGET RPJMD	REALISASI S.D. TRW II	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)	
	21	Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat	20.2	Jumlah desa sadar hukum	10	45	0	0,00	22,22
	22	Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)	21.1	Cakupan penegakan perda dan/atau perkada	528	1.676	0	0,00	22,04
	23	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	22.1	Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk	54,74	47	54,74	116,47	119
			22.1	Jumlah Kriminalitas	375	375	0	0,00	124,24
	24	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi	23.1	Jumlah kerjasama	2	1	0	0,00	100
III	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan								
	24	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi	24.1	Kemantapan jalan kabupaten	68,72	67,25	68,72	102,19	106,96
			24.3	Jumlah ruas jalan kabupaten yang dilalui angkutan penumpang umum	11	12	11	91,67	100
			24.4	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	15.566	322	0	0,00	77,22
	25	Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air	25.1	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	29,78	22,195	29,78	134,17	136,43
	26	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	26.1	Cakupan desa/kelurahan dengan akses sarana prasarana dasar permukiman	22,64	72,4	22,64	31,27	34,94
	27	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang	27.1	Rasio elektrifikasi rumah tangga	-	99,37	0	0,00	0
	28	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	28.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,58	69,58	69,58	100,00	100
	29	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola Pemerintah	29.1	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan	1,41	1,41	1,41	100,00	104,44
	30	Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat	30.2	Persentase kejadian bencana alam yang tidak ada korban jiwa (dan material)	7,19	19,74	0	0,00	102,71
	31	Meningkatnya kualitas penataan ruang	31.1	Jumlah Rencana Tata Ruang	7	10	7	70,00	87,5
IV	Membangun perekonomian daerah yang tangguh								
	32	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	32.1	Jumlah koperasi aktif	315	351	315	89,74	94,03
			32.2	Jumlah UMKM	15.567	14.133	15567	110,15	390,84
	33	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	33.1	Lama proses perijinan	10	10	10	100,00	100
			33.2	Realisasi nilai investasi		194	0	0,00	
	34	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	34.1	Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	12	13	12	92,31	100
			34.2	Jumlah komoditas yang diunggulkan yang bersertifikat		5	0	0,00	
			34.3	Jumlah kunjungan wisatawan	410.970	600.000	0	0,00	74,72
	35	Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	35.1	Jenis komoditi industri	30	32	30	93,75	96,77
	36	Meningkatnya kualitas sarana	36.1	Jumlah pasar pemda	4	4	4	100,00	100

NO. MISI	NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		REALISASI S.D. TAHUN 2017	TAHUN 2018			CAPAIAN KINERJA S.D. TRW II TAHUN 2018
						TARGET RPJMD	REALISASI S.D. TRW II	CAPAIAN KINERJA RPJMD (%)	
		prasarana perekonomian masyarakat	36.2	Jumlah pasar desa	48	48	48	100,00	100
	37	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan		LPE	5,03	5,05		0,00	100
				PDRB Per kapita (AdHB)	21.624.153,00	21.795.134,00		0,00	99,22
				Daya Beli Masyarakat	8.285.300,00	8.285.300,00		0,00	100
			37.4	Inflasi	4,16	7,07		0,00	99,52
			37.5	Pengangguran	5,17	5,32		0,00	98,29
			37.6	Indeks Gini	0,33	0,31		0,00	100
	38	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	38.1	Luas tanah pertanian pangan berkelanjutan	16.802,29	16.802,29	16.802,29	100,00	100
	39	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan, perikanan dan kehutanan	39.1	Jumlah produksi sektor pertanian		577.476,00		0,00	
				Jumlah produksi sektor perkebunan		21.168,55		0,00	95,33
				Jumlah produksi sektor peternakan		75.053,06		0,00	120,4
				Jumlah produksi sektor perikanan		78.541		0,00	99,81
			39.3	Konsumsi ikan	18,11	18,27	18,11	99,12	101,12
	40	Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani	40.1	Jumlah promosi hasil					
				a. Pertanian/perkebunan	5	5		0,00	100
				b. Peternakan	8	4		0,00	200
				c. Kehutanan	6	1		0,00	600
			40.2	Nilai Tukar Petani (NTP)	112,01	106		0,00	105,56
	41	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	41.1	Cadangan pangan daerah dan masyarakat;	97,8	102	97,8	95,88	72,44
			41.2	Stabilisasi harga dan pasokan pangan	90	90	90	100,00	100
			41.3	Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE)	100	100	100	100,00	100
V	Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan								
	42	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	42.1	Aparatur desa yang mengikuti diklat	1.032,00	100		0,00	1032
			42.2	Bangunan desa dalam kondisi baik	85,07	81,4	85,07	104,51	109,74
	43	Menurunnya jumlah desa tertinggal	43.1	Jumlah desa tertinggal	27	26	27	103,85	100
	44	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	44.1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif	265	265	265	100,00	100,38
	45	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa	45.1	Jumlah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	237	292	237	81,16	81,72
	46	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan	46.1	Jumlah Desa Swasembada	59	60	59	98,33	118

Berdasarkan uraian pada bagian ini, dapat diukur pencapaian RPJMD maupun RKPD Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan II Tahun 2018. Terkait dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2018, selain pencapaian target kinerja dan anggaran, hal penting lainnya yang harus diidentifikasi adalah faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan data pada tabel diatas, secara umum pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ciamis berdasarkan RPJMD Tahun 2014-2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 yang terdiri dari 46 Sasaran telah mencapai bahkan melebihi target (capaian kinerja >100%), kecuali untuk beberapa sasaran khususnya pada Misi II dan III belum mencapai target.

Terkait dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II, selain pencapaian target kinerja dan anggaran, hal penting lainnya yang harus diidentifikasi adalah faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian (hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target) diantaranya ketersediaan dana tepat waktu, terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya. Faktor penghambat pencapaian kinerja (hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas) diantaranya proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan, kondisi iklim yang tidak mendukung, serta mutasi jabatan.

2.2.3. Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2018

Beberapa catatan atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan indikator dari kegiatan yang sama hanya berbeda OPD sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan evaluasi.
2. Beberapa kegiatan dalam Renstra OPD belum sesuai dengan kerangka pendanaan dalam RPJMD serta selisih pagu program antara RPJMD dan Renstra OPD. Disamping itu, data dan informasi yang dimuat dalam beberapa Renstra OPD belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada.
3. Judul dan pagu program/kegiatan dalam RKPD/APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah judul dan pagu program dalam RPJMD/Renstra OPD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 untuk tahun keempat yaitu tahun 2018.
4. Hasil evaluasi Renja OPD belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan.
5. Konsistensi judul, indikator, target, kelompok sasaran, lokasi, dan pagu anggaran program/kegiatan pada setiap dokumen akan membuat mudah pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sehingga hambatan/ kendala maupun keberhasilan pembangunan dapat diketahui sejak dini.
6. Perlu penyempurnaan ketentuan tentang indikator dan satuan target kegiatan agar program kegiatan yang sama pada seluruh OPD memiliki indikator dan target yang sama sehingga memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi.
7. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra OPD dalam rangka memastikan kesesuaian antara Renstra OPD dengan RPJMD, serta memberikan fasilitasi dan pendampingan secara khusus dalam penyusunan hasil evaluasi Renstra dan Renja OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi *Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2018*

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi diantaranya : (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan : 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 2) target sasaran pembangunan Daerah; 3) prioritas pembangunan Daerah; 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka rekomendasi kebijakan dan program/kegiatan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Rekomendasi Program dan Kegiatan untuk Perubahan RKPD Tahun 2018

No.	Urusan	Evaluasi RKPD Tahun 2017	Evaluasi RKPD Tahun 2018 s.d. Triwulan II	Rekomendasi
I	Wajib Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pendidikan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan pencapaian AMH, RLS, Partisipasi anak usia dini dalam PAUD, dan 7 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pencapaian target indikator kinerja dan penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD diantaranya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penatausahaan sistem informasi pendidikan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
2	Urusan Kesehatan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk menurunkan jumlah kematian bayi, AHH, jumlah balita gizi buruk, rasio posyandu per satuan balita, dan mempertahankan atau meningkatkan capaian 14 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pencapaian target indikator kinerja dan penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD diantaranya Jamkesmas PBI, pembangunan rumah sakit, dan pengadaan alat kesehatan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kemantapan jalan kabupaten, panjang jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik, dan 7	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk mempertahankan tingkat kemantapan jalan kabupaten (kondisi baik), meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya melalui penambahan program dan kegiatan

No.	Urusan	Evaluasi RKPD Tahun 2017	Evaluasi RKPD Tahun 2018 s.d. Triwulan II	Rekomendasi
		indikator lainnya	diharapkan)	yang sudah tercantum dalam RKPD diantaranya pembangunan gedung kantor; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan persentase rumah tangga pengguna air bersih di perkotaan dan perdesaan, persentase rumah layak huni, persentase Tempat Pemakaman Umum per satuan Penduduk dan 4 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pencapaian indikator kinerja dan penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk ketersediaan dokumen rencana tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, dan 2 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pencapaian target indikator kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
13	Urusan Sosial	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial, dan sarana sosial	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, penanggulangan PMKS; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
II Wajib Non Pelayanan Dasar				
7	Urusan Tenaga Kerja	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk penurunan angka pengangguran, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja, serta keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk penurunan angka pengangguran, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja, serta keselamatan dan perlindungan tenaga kerja; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, persentase penanganan KDRT dan <i>trafficking</i> dan 3 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan <i>Indeks Development Gender</i> ; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
9	Urusan Pangan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk implementasi regulasi ketahanan pangan, dan ketersediaan pangan utama (padi dan jagung).	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk optimalisasi pencapaian Skor Pola Pangan Harapan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
10	Urusan Pertanahan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan penataan dan penyelesaian masalah pertanahan.	Nilai kinerja keuangan : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan), dan Nilai kinerja fisik : Sedang (pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk penataan dan penyelesaian masalah pertanahan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
11	Urusan Lingkungan Hidup	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan persentase penanganan sampah, persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti, pencegahan pencemaran air, persentase RTH yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah di wilayah perkotaan, persentase luas kawasan lindung dan berfungsi lindung terhadap luas wilayah dan 4 indikator lainnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pencapaian target meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kepemilikan KTP, akte kelahiran per 1.000 penduduk, penerapan KTP nasional berbasis NIK dan 2 indikator	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan kepemilikan KTP, akte kelahiran per 1.000 penduduk, penerapan KTP nasional berbasis NIK; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.

No.	Urusan	Evaluasi RKPD Tahun 2017	Evaluasi RKPD Tahun 2018 s.d. Triwulan II	Rekomendasi
		lainnya	diharapkan)	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa, dan pembinaan PKK dan posyandu	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk menurunkan rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga, dan meningkatkan cakupan peserta KB aktif	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif dan rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW); serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
15	Urusan Perhubungan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan jumlah fasilitas keselamatan lalulintas, jumlah halte, jumlah terminal dalam kondisi baik, jumlah Uji KIR baik untuk angkutan umum dan angkutan tidak umum	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan jumlah fasilitas keselamatan lalulintas, jumlah halte, jumlah terminal dalam kondisi baik, jumlah Uji KIR baik untuk angkutan umum dan angkutan tidak umum, penambahan kegiatan pembangunan gedung kantor; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk pengembangan website milih pemerintah daerah	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pengembangan website milik pemerintah daerah; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut
17	Urusan Koperasi dan UKM	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan persentase koperasi aktif, peningkatan jumlah UMKM dan UMK	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk peningkatan persentase koperasi aktif, peningkatan jumlah UMKM dan UMK; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
18	Urusan Penanaman Modal	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan layanan perizinan, dan peningkatan jumlah investasi	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk peningkatan layanan perizinan, dan peningkatan jumlah investasi; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan jumlah lapangan olahraga, organisasi olahraga, organisasi pemuda, dan jumlah kegiatan olahraga	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
20	Urusan Statistik	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan data/informasi/statistik daerah	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan pemenuhan kebutuhan data/informasi/statistik daerah; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
21	Urusan Persandian	Indikasi program dan kegiatan ditujukan diantaranya untuk optimalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk optimalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
22	Urusan Kebudayaan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta pemeliharaan situs seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan) dan Nilai kinerja fisik : Sedang (pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta pemeliharaan situs seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
23	Urusan Perpustakaan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan jumlah perpustakaan, koleksi buku perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan budaya baca masyarakat; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.

No.	Urusan	Evaluasi RKPD Tahun 2017	Evaluasi RKPD Tahun 2018 s.d. Triwulan II	Rekomendasi
24	Urusan Kearsipan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan penerapan pengelolaan arsip secara baku	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk peningkatan penerapan pengelolaan arsip secara baku; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
III	Pilihan			
25	Urusan Kelautan dan Perikanan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan produksi ikan, konsumsi ikan, dan peran sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pengembangan kawasan perikanan andalan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
26	Urusan Pariwisata	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisata dan peran sub sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk meningkatkan kunjungan wisata, pembangunan <i>Tourist Information Centre</i> ; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
27	Urusan Pertanian	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai, cabe merah, pisang, dan manggis	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi untuk penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD dalam rangka pengembangan tanaman kelapa, Posluhdes, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur, pengembangan Jalan Usaha Tani, dan BOP penyuluhan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
28	Urusan Perdagangan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan peran sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, dan penyediaan pasar Pemda dan pasar desa	Nilai kinerja keuangan : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan) dan Nilai kinerja fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi untuk penambahan program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD dalam rangka pembinaan cukai tembakau; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
29	Urusan Perindustrian	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk peningkatan peran sub sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan pembinaan kelompok pengrajin	Nilai kinerja keuangan : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan) dan Nilai kinerja fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk peningkatan peran sub sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan pembinaan kelompok pengrajin; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
30	Urusan Ketransmigrasian	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk membuka peluang bagi masyarakat Kabupaten Ciamis yang memenuhi syarat untuk melakukan transmigrasi yang berdampak bagi peningkatan taraf hidupnya	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk mengoptimalkan pencapaian <i>outcome</i> program transmigrasi, serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
IV	Penunjang			
31	Urusan Perencanaan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan pendekatan <i>tematik, holistik, integratif, dan spasial</i> .	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka sinergitas dan integrasi perencanaan pembangunan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
32	Urusan Keuangan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas pelaporan keuangan.	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, dan akuntabilitas pelaporan keuangan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.

No.	Urusan	Evaluasi RKPD Tahun 2017	Evaluasi RKPD Tahun 2018 s.d. Triwulan II	Rekomendasi
33	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk pelayanan dan administrasi pegawai, serta untuk meningkatkan kinerja pegawai.	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
34	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, analisis data perencanaan pembangunan, serta kebijakan inovasi daerah.	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, analisis data perencanaan pembangunan, serta kebijakan inovasi daerah; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
35	Pengawasan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
V	Pendukung	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk optimalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
VI	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk pembinaan politik daerah, pembinaan LSM, Ormas dan OKP.	Nilai kinerja keuangan : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan), dan Nilai kinerja fisik : Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk pembinaan politik daerah, pembinaan LSM, Ormas dan OKP; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.
VII	Kewilayahan	Indikasi program dan kegiatan ditujukan untuk optimalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan.	Nilai kinerja keuangan dan fisik : Sangat Rendah (pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan)	Indikasi program/kegiatan difokuskan untuk optimalisasi pelayanan dan administrasi pemerintahan di wilayah kecamatan; serta rasionalisasi belanja dan indikator kegiatan yang tidak relevan terhadap indikasi tersebut.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Ciamis Tahun 2017 dan proyeksi perekonomian Tahun 2018-2019 serta analisis statistiknya dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2018 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Hal ini juga tidak terlepas dari perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial sebagai dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis program secara efektif dan efisien.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global termasuk kebijakan MEA serta tantangan yang masih akan dihadapi, maka arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah :

- a. Penguatan dan merintis pemantapan komoditi unggulan daerah yang mempunyai daya saing regional dan nasional.
- b. Penguatan iklim berusaha dan investasi.
- c. Penguatan promosi, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana investasi.
- d. Penguatan daya saing kelompok ekonomi produktif dan koperasi.

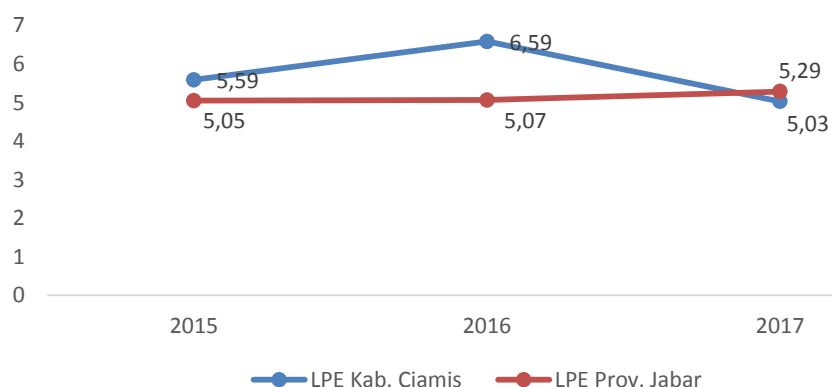
Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pemerataan PDRB perkapita, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan jumlah investasi.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Ciamis

Kualitas perkembangan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Secara umum capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis Tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat. Perkembangan (LPE) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2015 sebesar 5,59% dan mengalami percepatan pada Tahun 2016 menjadi sebesar 6,59% dan estimasi Tahun 2017 melambat menjadi sebesar 5,03 %. Sedangkan LPE Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sebesar 5,05% dan mengalami sedikit percepatan pada Tahun 2016 menjadi 5,07% serta mengalami percepatan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 5,29%. Capaian LPE Kabupaten Ciamis dan LPE Provinsi Jawa Barat tersaji dalam grafik berikut:

Grafik 3.1
Capaian LPE Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2016, Estimasi Tahun 2017
dan Provinsi Jawa Barat



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis dan BPS Prov. Jabar

Estimasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis tertinggi Tahun 2017 berasal dari kategori Jasa Pendidikan sebesar 11,17% kemudian kategori Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya sebesar 10,10% serta kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,38%. Secara keseluruhan estimasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2017 melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 6,59%. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2016 dan estimasi Tahun 2017 selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Ciamis Capaian Tahun 2015-2016 dan Estimasi Tahun 2017 (%)

Kategori	Uraian	Capaian Tahun		Estimasi Tahun
		2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(0,93)	6,47	0,22
B	Pertambangan dan Penggalian	0,55	(0,71)	0,86
C	Industri Pengolahan	6,92	7,38	6,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,68	6,04	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,21	5,97	1,21
F	Konstruksi	4,71	4,50	3,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,27	7,29	4,71
H	Transportasi dan Pergudangan	9,44	6,23	9,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,87	6,92	6,90
J	Informasi dan Komunikasi	15,43	12,92	7,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,86	6,99	6,87
L	Real Estate	5,01	5,02	5,04
M,N	Jasa Perusahaan	7,11	7,12	7,13
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,23	2,19	0,01
P	Jasa Pendidikan	11,62	6,10	11,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,16	8,60	8,79

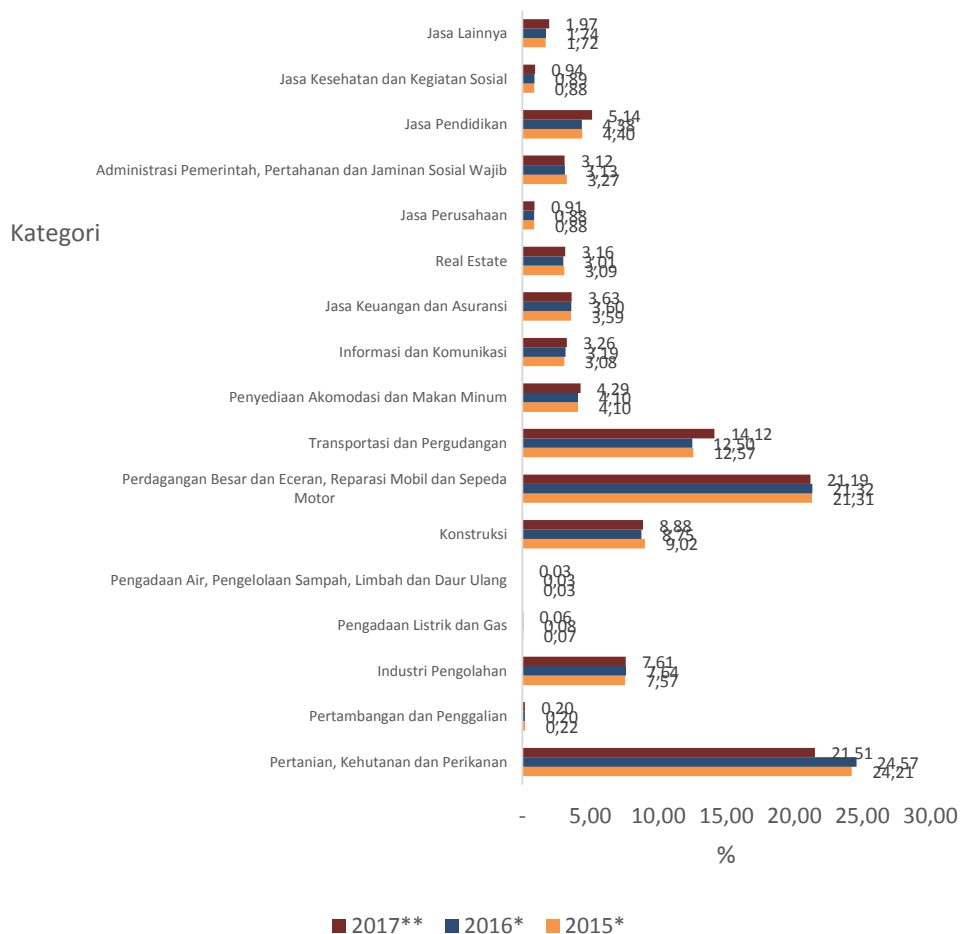
Kategori	Uraian	Capaian Tahun		Estimasi Tahun
		2015	2016	2017
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,61	6,48	10,10
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,59	6,59	5,03

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Kondisi ekonomi daerah dapat terlihat dari gambaran kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), gini rasio, tingkat inflasi, sumbangan kategorial, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya yang tersedia di daerah, baik pada Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Nilai dan kontribusi berdasarkan lapangan usaha PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku capaian Tahun 2015-2016 dan estimasi Tahun 2017 seperti pada grafik berikut:

Grafik 3.2
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ciamis Capaian Tahun 2015-2016 dan Estimasi Tahun 2017 Menurut Kategori (AdHB)



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

*Angka Capaian, **Angka Estimasi

Dari grafik tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu Tahun 2015-2016 capaian kontribusi kategori terbesar adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga masih merupakan kategori unggulan Kabupaten Ciamis. Kontribusi kategori terbesar kedua yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan berikutnya adalah kategori transportasi dan pergudangan. Demikian juga dengan estimasi Tahun 2017 dimana kontribusi terbesarnya sama dengan capaian Tahun 2015 dan 2016.

Tabel berikut menyajikan PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku Capaian Tahun 2015-2016 dan estimasi Tahun 2017 menurut lapangan usaha.

Tabel 3.2
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku
Capaian Tahun 2015-2016 dan Estimasi Tahun 2017 Menurut Kategori (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Capaian Tahun		Estimasi Tahun
		2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.438.359,99	6.024.072,41	5.540.544,9
B	Pertambangan dan Penggalian	48.573,96	48.613,86	51.317,7
C	Industri Pengolahan	1.700.126,85	1.872.314,83	1.960.148,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.534,35	18.545,61	16.139,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.306,03	8.394,34	7.689,0
F	Konstruksi	2.025.104,63	2.145.662,77	2.287.839,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.786.838,40	5.227.178,41	5.457.938,4
H	Transportasi dan Pergudangan	2.824.079,88	3.065.603,23	3.636.261,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	920.532,88	1.005.075,59	1.104.151,7
J	Informasi dan Komunikasi	692.096,59	782.533,32	840.391,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	806.078,40	882.566,10	934.105,4
L	Real Estate	693.791,53	737.891,21	815.307,0
M,N	Jasa Perusahaan	198.277,49	214.602,02	233.852,1
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	733.859,56	767.437,42	802.542,0
P	Jasa Pendidikan	989.389,09	1.074.331,69	1.323.212,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196.624,63	218.391,90	241.834,2
R,S,T,U	Jasa Lainnya	385.575,17	427.613,94	508.158,2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22.462.149,43	24.520.828,65	25.761.434,5

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku (AdHB) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2015 capaian PDRB AdHB sebesar Rp22,46 Trilyun, meningkat pada Tahun 2016 menjadi sebesar Rp24,52 Trilyun dan estimasi Tahun 2017 juga meningkat menjadi sebesar Rp25,76 Trilyun.

Capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2015 sebesar 17,78 trilyun, meningkat Tahun 2016 menjadi 18,95 Trilyun dan estimasi Tahun 2017 menjadi sebesar Rp19,61 Trilyun. Kontribusi estimasi kategori PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan terbesar Tahun 2017 yaitu kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi sebesar

21,97%, kemudian kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,57% dan kategori transportasi dan perdagangan sebesar 12,90%.

Gambaran Capaian PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2016 dan Estimasi Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2015-2016 dan Estimasi Tahun 2017 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Capaian Tahun		Estimasi Tahun
		2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.918.595,70	4.172.106,83	3.838.089,4
B	Pertambangan dan Penggalian	38.449,07	38.177,87	39.110,4
C	Industri Pengolahan	1.384.131,78	1.486.333,08	1.577.150,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.525,81	13.282,19	12.649,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.026,36	6.386,10	6.174,2
F	Konstruksi	1.658.172,91	1.732.764,84	1.801.971,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.902.990,39	4.187.449,32	4.308.490,3
H	Transportasi dan Pergudangan	2.113.382,79	2.245.125,15	2.530.537,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	725.629,57	775.854,47	829.503,4
J	Informasi dan Komunikasi	693.327,63	782.919,01	856.723,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	658.164,65	704.167,77	751.481,7
L	Real Estate	559.972,26	588.082,87	617.785,4
M,N	Jasa Perusahaan	157.842,09	169.080,45	181.131,8
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	656.479,72	670.885,42	671.262,3
P	Jasa Pendidikan	810.202,93	859.606,75	1.001.208,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.226,65	174.009,42	189.613,9
R,S,T,U	Jasa Lainnya	323.790,67	344.759,53	397.958,5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17.779.910,99	18.950.991,07	19.610.841,5

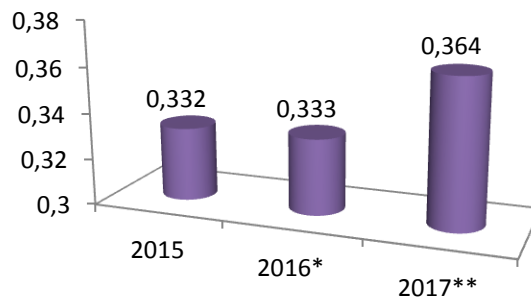
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis berdasarkan harga berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal capaiannya mampu meningkat dari Tahun 2015 yang mencapai Rp19,22 juta menjadi Rp20,86 juta pada Tahun 2016 dan estimasi Tahun 2017 sebesar Rp21,79 juta. Begitu pula dengan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis atas dasar harga konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Ciamis, capaian pada Tahun 2015 sebesar Rp. 15,21 juta dan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 16,12 juta dan estimasi Tahun 2017 sebesar Rp16,59 juta.

Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (*World Bank*) adalah $G < 0,40$ berarti ketimpangan rendah, $0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Grafik berikut menunjukkan bahwa selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 kondisi gini rasio di Kabupaten Ciamis berada pada angka $< 0,40$

yang artinya memiliki tingkat ketimpangan rendah. Pada Tahun 2015 kondisi gini rasio di Kabupaten Ciamis memiliki tingkat ketimpangan 0,332; Tahun 2016 sebesar 0,333; dan pada Tahun 2017 sebesar 0,364.

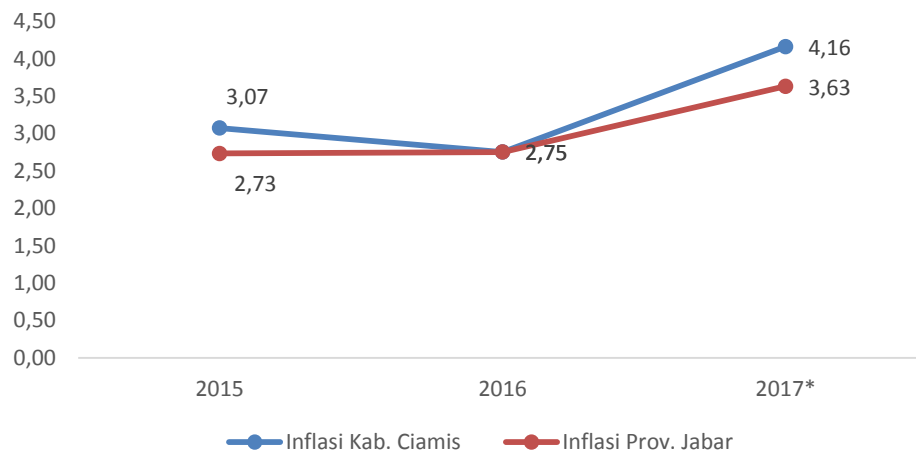
Grafik 3.3
Gini Rasio Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis
*)Angka Sementara

Laju Inflasi Kabupaten Ciamis pada Tahun 2015 mencapai 3,07%, lebih tinggi dibanding Tahun 2016 yang mencapai 2,75% dan 4,16% pada Tahun 2017. Laju inflasi Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017 tergolong inflasi ringan atau inflasi merayap (*creeping inflation*) yang masih wajar dan belum mengganggu perekonomian secara menyeluruh. Pada tahap inflasi ringan diyakini dapat mendorong peningkatan pendapatan nasional. Gambaran Laju inflasi Kabupaten Ciamis dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana grafik 3.4 berikut :

Grafik 3.4
Laju Inflasi Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2017



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis dan BPS Prov. Jabar

Sepanjang Tahun 2017 terjadi inflasi selama 11 (sebelas) bulan, sedangkan deflasi terjadi selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Oktober 2017. Inflasi tertinggi pada bulan Januari yaitu sebesar 0,88%. Pemicu tinggi inflasi di bulan Januari diantaranya karena naiknya tarif listrik sehingga memicu harga-harga komoditas lainnya. Sedangkan inflasi terendah yaitu pada bulan Maret sebesar 0,02%.

Pada awal tahun yaitu pada Januari 2017 terjadi inflasi sebesar 0,88%. Inflasi ini disumbang oleh kelompok bahan makanan dengan andil inflasi tertinggi sebesar 0,394%. Pada bulan Februari terjadi inflasi sebesar 0,32%, kelompok yang andil inflasinya tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,160%. Tingginya andil inflasi ini masih terkait dengan naiknya tarif listrik yang ada dikelompok ini di bulan Januari 2017. Sedangkan pada bulan Maret 2017 terjadi inflasi tipis sebesar 0,022%. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar menjadi penyumbang inflasi dengan andil inflasi sebesar 0,046%.

Pada bulan April terjadi inflasi sebesar 0,58%. Kelompok yang memberikan andil inflasi pada bulan ini masih berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan andil inflasi sebesar 0,243%. Bulan Mei terjadi inflasi sebesar 0,56. Kelompok yang memberikan andil inflasi pada bulan ini berasal dari kelompok bahan makanan dengan andil inflasi sebesar 0,221%. Sementara pada bulan Juni terjadi inflasi sebesar 0,63%. Kelompok yang memberikan andil inflasi pada bulan ini berasal dari kelompok bahan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan andil inflasi sebesar 0,578%. Pada bulan ini bersamaan dengan adanya momen lebaran atau hari raya Idul Fitri.

Pada bulan Juli terjadi inflasi tipis sebesar 0,04%. Kelompok yang memberikan andil inflasi pada bulan ini berasal dari kelompok bahan sandang dengan andil inflasi sebesar 0,272%. Pada bulan ini masih rangkaian adanya momen lebaran atau hari raya Idul Fitri. Pada bulan Agustus terjadi inflasi sebesar 0,11%. Kelompok yang memberikan andil inflasi pada bulan ini berasal dari kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,272%.momen liburan panjang pasca lebaran memicu belanja kelompok ini meningkat sehingga menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Bulan September terjadi inflasi sebesar 0,36%. Kelompok yang memberikan andil inflasi pada bulan ini berasal dari kelompok bahan sandang dengan andil inflasi sebesar 0,232%.

Pada bulan Oktober merupakan satu-satunya bulan yang mengalami deflasi sepanjang Tahun 2017 dengan deflasi sebesar 0,07%. Kelompok yang memberikan andil deflasi tertinggi pada bulan ini adalah kelompok bahan makanan, sedangkan kelompok pengeluaran lainnya stabil.

Pada bulan November terjadi inflasi sebesar 0,18%. Kelompok yang memberikan andil inflasi tertinggi pada bulan ini adalah kelompok bahan makanan dengan andil inflasi 0,112%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi adalah sandang dan untuk kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan tidak mengalami gejolak harga.

Bulan Desember terjadi inflasi sebesar 0,47%. Kelompok yang memberikan andil inflasi tertinggi pada bulan ini adalah kelompok bahan makanan dengan andil inflasi tertinggi 0,346%.

Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi adalah kelompok makanan sandang dengan andil deflasi sebesar 0,002%.

Inflasi tahunan, selama Tahun 2017 yaitu sebesar 4,16%. Inflasi tahunan ini lebih besar dari inflasi gabungan 7 Kota IHK di Jawa Barat sebesar 3,63% namun lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,61%.

Fluktuasi kenaikan harga komoditas bahan kebutuhan pokok relatif sering terjadi sepanjang Tahun 2017 utamanya menyangkut kebutuhan bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, daging ayam, telur dan lainnya. Keadaan tersebut akan sangat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jika komoditas barang-barang semakin mahal sementara pendapatan rumah tangga tidak meningkat, maka daya beli masyarakat akan cenderung menurun dan imbasnya adalah tingkat kesejahteraan akan sulit ditingkatkan. Diperlukan kontrol perubahan harga komoditas bahan kebutuhan pokok yang lebih kuat dari pemerintah daerah, agar lebih mudah mendeteksi kelangkaan pasokan dan dipersiapkan langkah dan strategi untuk mengatasinya agar masyarakat tetap terjamin kebutuhan pokok hidupnya. Melakukan kegiatan “Operasi Pasar” secara berkala untuk beberapa jenis komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat (nilai konsumsinya tinggi) akan menekan angka inflasi. Adanya program Raskin juga secara langsung berdampak terhadap turunnya angka inflasi khususnya untuk komoditas beras.

Upaya pengendalian inflasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersifat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan *stakeholder* (pemangku kepentingan), sebagai pemberi bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyikapi perkembangan fluktuasi harga terkini dan langkah-langkah strategis yang diperlukan. Selain itu, menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan strategis berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah sesuai dengan pola musimannya dengan melakukan koordinasi antar pemerintah daerah wilayah perbatasan. Menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan dari sentra produksi pangan ke tempat-tempat yang memerlukannya dan pasokan ini tidak boleh terhambat masalah cuaca yang selama ini dijadikan alasan. Kemudian melakukan upaya-upaya menurunkan inflasi pangan dengan membuka keran impor bahan pangan jika pasokan dalam negeri diperkirakan tidak akan mencukupi dan diumumkan jauh-jauh hari sehingga harga bahan pangan belum sempat meroket serta meredam dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap kenaikan harga barang-barang pada umumnya melalui kebijakan Bank Indonesia (BI).

Gambaran kondisi sosial ekonomi lainnya di Kabupaten Ciamis dapat dilihat diantaranya berdasarkan indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ciamis Tahun 2015 yaitu sebesar 6,99%, pada Tahun 2016 menjadi sebesar 6,95% pada Tahun 2017 dan menurun menjadi sebesar 5,17%. Tingkat pengangguran ini selaras dengan tingkat kesempatan kerja sebesar 93,01 pada Tahun 2015 dan menjadi sebesar 93,05 pada Tahun 2016 serta meningkat pada Tahun 2017 menjadi sebesar 94,83%. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ciamis terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti dalam tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Indikator Ketenagakerjaan dan Kemiskinan
di Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2017

No	Indikator	Tahun			Satuan
		2015	2016	2017	
1	Penduduk miskin				
	- Jumlah (orang)	104.870	98.770	96.760	Orang
	- Persentase (%)	8,98	8,42	8,20	%
2	Angkatan Kerja	531.235	543.369	634.932	Orang
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,99	6,95	5,17	%
4	Tingkat Kesempatan Kerja	93,01	93,05	94,83	%
5	Upah Minimum Kabupaten*	1.177.000	1.363.319	1.475.792	Rp.

Sumber: BPS dan *) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis

Ukuran kemiskinan yang digunakan untuk memberikan gambaran tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis untuk mengukur kemajuan pengembangan wilayah menggunakan angka kemiskinan agregat, atau yang sering disebut angka kemiskinan makro. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berbagai kebijakan telah disusun dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan dengan dukungan anggaran pusat, provinsi maupun pemerintah daerah tentunya tercermin dari penurunan jumlah penduduk miskin.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 104.870 orang, Tahun 2016 menurun menjadi 98.770 orang dan Tahun 2017 sebanyak 96.760 orang. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis mengindikasikan masih perlunya penerapan program-program kemiskinan yang lebih luas serta berkelanjutan sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis salah satunya didukung oleh program inovasi daerah yaitu melalui penyaluran Kartu Waluya, Walagri dan Calakan sebagai pendampingan program Pusat dimana setiap tahunnya disalurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Perkembangan perekonomian Kabupaten Ciamis baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik pada prospek tataran global, nasional, lingkungan regional Jawa Barat, dan lingkungan Kabupaten Ciamis sendiri.

3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Daerah

a. Tantangan Global dan Nasional

Perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan secara bertahap, hal tersebut antara lain:

- Konsumsi rumah tangga di Q4-2017 membaik, walaupun masih sedikit di bawah 5,0% dimana faktor penyebabnya:
 - a. Smart consumers: masyarakat Indonesia lebih memilih dalam berbelanja yang seperlunya.
 - b. Leisure consumers: lebih menyenangi aktivitas terkait rekreasi.
 - c. Saving behavior: lebih banyak menabung terutama kelompok menengah ke atas.
- Industri non migas dalam dua kuartal terakhir tumbuh cukup baik (Q3 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional).
- Pengeluaran konsumsi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah lebih cepat, namun pengeluaran konsumsi masyarakat berpendapatan menengah ke atas melambat.

Sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dan 2019 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1



Sumber : RKP Tahun 2019

Berdasarkan gambar tersebut, kondisi ekonomi nasional secara umum diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan meningkat dari 5,07% pada Tahun 2017 menjadi 5,4% pada Tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 5,4-5,8%. Kondisi tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang akan berada di atas 6,0% mengingat Jawa Barat selalu berada di atas nasional dalam hal pencapaian pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan stimulus positif terhadap indikator makro ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan.

b. Tantangan dan Prospek Regional Jawa Barat

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. Pertama, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan Nasional. Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang di hadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) perekonomian Nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu di optimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi Nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makro ekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah panjang dan kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makro ekonomi, serta koninuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi kedua yang mengemuka dan perlu mendapat catatan khusus pada tahun 2017 ialah masih munculnya sumber pembiayaan ekonomi yang luar biasa melalui program Pengampunan Pajak. Perluasan basis pajak yang dicapai melalui program Pengampunan Pajak diharapkan diikuti intensifikasi pajak guna semakin meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Potensi ketiga ialah potensi teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech (financial technology)* dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik. Ketiga potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera.

Kedua, antisipasi kebijakan pemerintah terkait *administered price*. Kondisi tahun depan (2018), melihat perkembangan *update* kondisi terakhir Tahun 2017 baik. Namun demikian, tantangan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Tahun 2018 tidak lebih mudah dibandingkan Tahun 2017. Perkembangan peran pengeluaran konsumsi rumah tangga Tahun 2018 diantaranya diperkirakan akan menghadapi tantangan menuju keseimbangan baru sebagai dampak dari kenaikan sejumlah komoditas yang harganya diatur pemerintah, seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) kelompok rumah tangga konsumen 900 VA, penyesuaian harga BBM non subsidi serta perubahan harga gas elpiji 3 Kg dan perubahan-perubahan harga

komoditas lainnya yang dinamis. Peran Kenaikan Pengeluaran konsumsi rumah tangga secara umum diperkirakan akan sangat tergantung pada kondisi tingkat inflasi tahun ini.

Ketiga, ekspektasi lingkungan bisnis. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan masih akan tumbuh positif, sejalan dengan ekspektasi kenaikan pertumbuhan kredit, perbaikan kondisi lingkungan investasi dan perekonomian serta dampak dari relaksasi kebijakan pemerintahan melalui implementasi paket-paket kebijakan ekonomi.

Keempat, harapane fektivitas kebijakan fiskal. Pengeluaran Konsumsi pemerintahan juga diharapkan bisa optimal tahun ini, sejalan dengan percepatan realisasi anggaran dan kemungkinan tidak adanya skenario fiskal pemerintah pusat terkait penundaan pencairan dana perimbangan, persiapan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, peningkatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur-infrastruktur strategis di Jawa Barat diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah.

Kelima, terkait kondisi ekspor dan impor (net ekspor) yang diperkirakan juga masih akan tumbuh positif, sejalan dengan perbaikan terbatas ekonomi global. Meningkatkannya harga minyak dunia dan perbaikan daya beli konsumen negara-negara timur tengah diharapkan bisa meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat Tahun 2018. Fluktuasi kurs yang mengarah kepada stabilitas dan keseimbangan baru diharapkan bisa mendorong daya saing komoditas ekspor Jawa Barat, disisi lain peningkatan nilai ekspor dapat dikendalikan sejalan dengan penguatan industri hulu regional terkait kontribusi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Keenam, terkait reformasi fiskal dan melanjutkan reformasi struktural tahap kedua. Reformasi fiskalnya berbentuk : (1) Belanja yang lebih baik, (2) Pengurangan subsidi dan penargetannya yang lebih baik, (3) Penambahan dana dan dengan insentif yang lebih baik bagi pemerintah daerah, dan (4) Strategi penerimaan jangka menengah yang fokus pada berkelanjutan. Sementara itu, reformasi strukturalnya diarahkan untuk : (1) Meningkatkan Investasi infrastruktur, termasuk swasta, (2) perbaikan kondisi bisnis (antara lain EODB), (3) Logistik yang lebih baik, (4) Perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi, (5) Kebijakan pertanahan/reformasi agraria, (6) kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri dan industri pariwisata, dan (7) Deregulasi peraturan/perijinan di daerah.

Ketujuh, terkait belanja infrastruktur. Sebagaimana disajikan pada Gambar 3.31 Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah : (1) Jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara (yang salah satunya ada di Kabupaten Majalengka), (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Teminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi. Bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2019 mendatang. Penurunan subsidi kan direlokasi untuk kebutuhan belanja infrastruktur yang memiliki multiplier besar terhadap perekonomian, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,4 – 5,8 persen.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat tahun ini diantaranya di dukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, Nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di Tahun 2019, Sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik.

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel. 3.5
Proyeksi Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2018-2019

No	Indikator Makro dan Pembangunan	2018	2019
1	LPE (%)	5,4 – 5,7	5,4 – 5,7
2	TPT (%)	7,8 – 8,1	7,9 – 8,00
3	Inflasi (%)	3,8 – 4,0	3,5 – 4,00
4	Kemiskinan (%)	8,1 – 8,4	8,0 – 8,2
5	Gini Rasio	0,400 – 0,401	0,39 – 0,400

Sumber: RPJMD Jawa Barat 2013 – 2018 dan outlook tim ekonomi Jabar

Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Jawa Barat Tahun 2017 maka dapat diproyeksikan bahwa pada Tahun 2018-2019 ekonomi Jawa Barat mampu tumbuh hingga 5,4 – 5,7 persen. Hal tersebut dapat terwujud dengan asumsi tidak ada perubahan drastis dan optimis.

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat adalah berikut ini:

- a. Strategi Meningkatkan kontribusi Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB, Penciptaan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan, dengan arah kebijakan : Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan 9 kelompok pangan terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah di kabupaten/kota yang memiliki laju penurunan skor Pola Pangan Harapan ketersediaan.
- b. Strategi Mempertahankan konsumsi energi 2,150 kkal/kap/hr dan ketersediaan energi 2,400 kkal/kap/hr
- c. Strategi Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan arah kebijakan : Fokus pada perbaikan di bidang industri dan pertanian dengan mempertahankan capaian kinerja di sektor perdagangan
- d. Strategi Memantapkan peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya, dengan arah kebijakan mendorong peningkatan nilai tambah di usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya.
- e. Strategi Membangkitkan lapangan industri pengolahan di Jawa Barat—sebagai sektor dengan kontribusi terbesar – khususnya upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektoral industri pengolahan, dengan arah kebijakan : mengupayakan perluasan pangsa pasar ekspor (melalui peran market intelegent dan juga *market penetration*), dan juga peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas tenaga kerja.
- f. Strategi Meningkatkan daya saing lapangan usaha konstruksi – melalui pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan : (1) fokus pada penigkaan aksesibilitas seluruh daerah di Jawa Barat; (2) Pengembangan Jasa keuangan & asuransi untuk mendukung

terwujudnya program financial inclusion di Jawa Barat; serta (3) peningkatan daya saing pendidikan dan kesehatan dengan sasaran peningkatan kualitas SDM.

- g. Strategi Membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, untuk mejadi stabilitas kesempatan kerja, dengan arah kebijakan : (1) Meningkatkan laju pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas – melalui penciptaan bibit unggul, teknologi tepat guna dan juga memberikan perlindungan kepada petani melalui subsidi untuk asuransi pertanian; (2) Meningkatkan aktivitas pasca panen, melalui upaya mendorong dan pengembangan industri-industri mikro, kecil dan menengah pengolah hasil pertanian, (3) pemberian insentif kepada aktivitas industri pengolah hasil pertanian, misalnya aksesibilitas modal bagi pengusaha mikro dan kecil yang diwujudkan bersamaan dengan program *financial inclusion*.

c. Tantangan Kabupaten Ciamis

Adapun tantangan yang dihadapi Kabupaten Ciamis dikaitkan dengan kondisi ekonomi daerah adalah :

1. Kegiatan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor transportasi pergudangan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Kabupaten Ciamis. Implikasi ekonomi dibalik kinerja ekonomi lapangan usaha tersebut memberikan optimisme bagi perbaikan perekonomian ke depan. Kecenderungan produksi yang meningkat pada setiap lapangan usaha memberikan indikasi bahwa ke depan akan terjadi penyerapan tenaga kerja pada setiap lapangan usaha, dan konsekuensinya memerlukan ketersediaan modal untuk menopang perkembangan tersebut, baik modal buatan manusia, sumber daya alam dan modal manusianya sendiri. Lebih dari itu, memahami bahwa kegiatan ekonomi suatu lapangan usaha terkait dengan kegiatan ekonomi lapangan usaha lainnya, oleh karena itu secara agregat peningkatan produksi pada suatu lapangan usaha berpotensi untuk menggerak dan mendorong kegiatan produksi pada lapangan usaha lainnya. Tidak jarang potensi ini bisa memperoleh respon yang lambat karena terdapat katup-katup yang menghalanginya. Sehingga, salah satu tugas pemerintah daerah adalah membuka katup tersebut supaya potensi perkembangan ekonomi bisa terealisasi. Arah kebijakan strategisnya adalah memperkuat keterkaitan suatu lapangan usaha dengan lapangan usaha lainnya, supaya hasil produksi suatu lapangan usaha lokal dapat menunjang kegiatan ekonomi lapangan usaha lokal lainnya. Setidaknya, arah kebijakan strategis ini akan memberikan manfaat berupa rendahnya biaya transportasi yang menunjang efisiensi kegiatan ekonomi setiap lapangan usaha. Hanya saja, biaya transaksi yang rendah juga bisa tertutupi potensinya oleh tingginya biaya transaksi (*transaction cost*) yang mencakup biaya untuk memperoleh informasi, negosiasi, monitoring, koordinasi dan penegakan hukum atau regulasi. Keberadaan biaya transaksi yang tinggi dapat menekan efisiensi produksi dan aspek pemerataan pendapatan.
2. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor transportasi dan pergudangan, merupakan tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi tertinggi dalam perekonomian Kabupaten

- Ciamis. Hampir separuh PDRB Kabupaten Ciamis bersumber dari ketiga sektor tersebut.
- Laju pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2018 diperkirakan mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan Tahun 2017, terkait dilaksanakan program-program unggulan pertanian terpadu, peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan kinerja penyuluh pertanian. Namun demikian, terdapat fenomena yang harus direspon terkait dengan perubahan iklim yang mendorong perubahan cuaca, mengingat aktivitas budidaya pada sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh cuaca dan antisipasi kemungkinan adanya kenaikan harga pupuk akibat pengurangan subsidi.

3.1.3.2 Prospek Perekonomian Daerah

Prediksi pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Ciamis yang mencapai 5% atau lebih, bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Ciamis dapat dioptimalkan dan disertai dengan tata kelola ekonomi yang baik, untuk mempercepat pembangunan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pencapaian kearah prediksi ekonomi makro yang optimis, tentunya menjadi tantangan ke depan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan terobosan-terobosan/inovasi-inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya dengan cara pendekatan pembangunan industri wilayah untuk mencapai daya saing daerah melalui pencapaian skala ekonomis. Perkiraan indikator pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 – 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.6

Perkiraan Indikator Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2019

No.	Indikator	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019
1.	a. Jumlah Penduduk (jiwa)	1.194.389	1.200.002
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	0,44	0,44
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,05	5,05
3.	Inflasi (persen)	3,99	3,83
4.	Nilai PDRB perkapita AdHB (Rp. juta)	21,62	21,62
5.	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk (%)	7,35	7,05
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,21	5,165

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2018 sebanyak 1.194.389 jiwa dan Tahun 2019 diperkirakan meningkat menjadi sebanyak 1.200.002 jiwa dengan perkiraan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,44%.

Persentase penduduk miskin Tahun 2018 diproyeksikan sebesar 7,35% dan Tahun 2019 diproyeksikan sebesar 7,05%. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan, diproyeksikan

untuk tingkat pengangguran terbuka juga diharapkan semakin berkurang, Tahun 2018 diproyeksikan sebesar 5,21% dan Tahun 2019 sebesar 5,165%.

Untuk perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2018 sebesar 5,05% sedangkan nilai inflasi Tahun 2018 diproyeksikan sebesar 3,99% dan Tahun 2019 diproyeksikan sebesar 3,83%. PDRB per kapita Atas dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 diperkirakan menjadi Rp21,62 juta pada Tahun 2018.

Bila dilihat dari kontribusinya, perekonomian Kabupaten Ciamis masih ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motordan sektor Transportasi dan Perdagangan.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penggerak pembangunan, baik dari segi penyedia bahan baku, kesempatan kerja, bahan pangan serta sebagai daya beli bagi produk yang dihasilkan oleh sektor lain. Demikian pula dengan Kabupaten Ciamis yang merupakan salah satu kabupaten dimana pertanian masih jadi penggerak roda perekonomian, sehingga pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Salah satu bentuk 'concern' Kabupaten Ciamis terhadap pengembangan sektor pertanian adalah dengan adanya rencana Kawasan Strategis Kawasan Agropolitan. Selain itu, dengan adanya kajian Potensi Pengembangan Pertanian Unggulan dan Pengembangan Potensi Unggulan Peternakan (Ayam Sentul) di Kabupaten Ciamis semakin menguatkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor unggulan pada Tahun 2018-2019.

Selama lima tahun terakhir volume APBD Kabupaten Ciamis terus meningkat secara nyata. Namun demikian kita masih dihadapkan pada kurangnya fasilitasi pendanaan melalui APBD dibandingkan dengan kebutuhan yang didasarkan pada aspirasi dan tuntutan masyarakat. Keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi melalui sumber pembiayaan lainnya selain APBD, seperti CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan tantangan serta prospek perkonomian mendatang maka arah kebijakan perekonomian Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah:

1. Pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi seperti pengembangan kawasan agropolitan dan lumbung padi, pengembangan sentra-sentra produksi andalan, percepatan pembangunan pertanian melalui revitalisasi pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian serta pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat serta pengembangan produk unggulan daerah dalam rangka peningkatan daya saing.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk memberdayakan peranan koperasi dan UKM, melalui peningkatan sumber daya manusia dalam hal manajerial dan teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi

- UKM, fasilitasi promosi produk-produk unggulan daerah (perluasan akses pasar) dan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan.
3. Meningkatkan potensi penyerapan tenaga kerja dan penyiapan tenaga kerja terampil.
 4. Memperkuat sektor industri manufaktur/pengolahan yang akan menyerap produk pertanian lokal (yang telah berkembang dan yang akan dikembangkan) meliputi potensi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hutan rakyat, dan perikanan budidaya.
 5. Industrialisasi pedesaan yang berpotensi untuk memajukan sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani/masyarakat desa, serta mendorong investasi yang diarahkan pada bisnis pengolahan produk pertanian.
 6. Penyederhanaan prosedur investasi.
 7. Pengembangan ekowisata, agrowisata, dan wisata budaya yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
 8. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, irigasi, listrik, pusat pemasaran secara bertahap.
 9. Penguatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang fokus, tepat sasaran, keberpihakan, koordinatif dan sinergitas).
 10. Meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
 11. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga pembangunan tidak hanya sisi ekonomi semata tetapi juga harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan yang memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2014-2019 di tahun keempat, perlu didukung dengan kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu pendukung strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber- sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diatur sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan hasil analisis dan realisasi sumber-sumber pendanaan daerah pada Tahun 2018, selanjutnya dirumuskan kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu dilakukan perubahan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Alokasi Dana Desa dari APBN; 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perencanaan pendapatan daerah pada perubahan Tahun 2018 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- a. Pendapatan diasumsikan naik sebesar 10,36% dari proyeksi Tahun 2018, terutama dari lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah dan tidak mengalami perubahan;
- c. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak diasumsikan naik 0,27%.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 69,63% dari bantuan keuangan dari Provinsi sebesar Rp.226.831.307.200 Milyar.

Adapun anggaran dan asumsi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran Tahun 2018	Perubahan Anggaran Tahun 2018	Bertambah /Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.202.559.010.000	2.430.852.359.200	228.293.349.200	10,36
1.1	Pendapatan asli daerah	215.240.788.000	215.240.788.000	-	-
1.1.1	Pajak daerah	52.724.105.575	52.724.105.575	-	-
1.1.2	Retribusi daerah	8.550.638.100	8.550.638.100	-	-
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	150.466.044.325	150.466.044.325	-	-
1.2	Dana perimbangan	1.665.881.670.000	1.670.348.758.000	4.467.088.000	0,27
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	65.943.922.000	70.411.246.000	4.467.324.000	6,77
1.2.2	Dana alokasi umum	1.183.061.992.000	1.183.061.992.000	-	-
1.2.3	Dana alokasi khusus	416.875.756.000	416.875.520.000	(236.000)	(0,00)
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	321.436.552.000	545.262.813.200	223.826.261.200	69,63
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	75.396.000.000	75.396.000.000	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	246.040.552.000	243.035.506.000	(3.005.046.000)	(1,22)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	-	226.831.307.200	226.831.307.200	100,00

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Ciamis, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan asset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dan menghambat investasi.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada perubahan anggaran Tahun 2018 dihitung dengan asumsi sebagai berikut

- a. Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 10,25% dari anggaran murni Tahun 2018;

- b. Perhitungan gaji menggunakan basis data Tahun 2017 dengan *acress* 2,5%.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial dan kegiatan-kegiatan yang mendesak.
- f. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
- g. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Tahun 2018.
- h. Dukungan terhadap program/kegiatan strategis provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun anggaran dan proyeksi perubahan belanja daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran Tahun 2018	Perubahan Anggaran Tahun 2018	Bertambah /Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA DAERAH	2.224.594.990.488	2.452.710.839.688	228.115.849.200	10,25
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.656.148.423.323	1.649.965.877.323	(6.182.546.000)	(0,37)
2.1.1	Belanja pegawai	1.132.036.979.323	1.132.036.979.323	-	-
2.1.2	Belanja bunga	-	465.833.334	465.833.334	100,00
2.1.3	Belanja subsidi	19.000.000.000	19.000.000.000	-	-
2.1.4	Belanja hibah	95.603.700.000	95.603.700.000	-	-
2.1.5	Belanja bantuan sosial	5.080.000.000	5.080.000.000	-	-
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	8.100.000.000	8.100.000.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	388.827.744.000	385.822.698.000	(3.005.046.000)	(0,77)
5.1.8	Belanja tidak terduga	7.500.000.000	3.856.666.666	(3.643.333.334)	(48,58)
2.2	Belanja Langsung	568.446.567.165	802.744.962.365	234.298.395.200	41,22
2.2.1	Belanja pegawai	53.124.899.398	53.971.629.398	846.730.000	1,59
2.2.2	Belanja barang dan jasa	321.478.452.811	332.352.665.711	10.874.212.900	3,38
2.2.3	Belanja modal	193.843.214.956	416.420.667.256	222.577.452.300	114,82

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perencanaan pembiayaan daerah pada perubahan anggaran Tahun 2018 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- Proyeksi pembiayaan daerah di perubahan APBD Tahun 2018 diasumsikan turun sebesar 0,81% dari anggaran murni Tahun 2018.
- Proyeksi penyertaan modal (investasi) daerah diasumsikan tetap dikarenakan penyertaan modal ke PDAM, BJB dan BPR sudah memenuhi target.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2017, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah dan penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUKM serta pembayaran pokok utang. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2018 di Kabupaten Ciamis antara lain diarahkan untuk :

- Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (prudential).

Adapun anggaran dan proyeksi perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Kondisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran Tahun 2018	Perubahan Anggaran Tahun 2018	Bertambah /Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
3.1	Penerimaan pembiayaan	39.350.540.488	64.350.540.488	25.000.000.000	63,53
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	39.350.540.488	39.350.540.488	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	25.000.000.000	25.000.000.000	100,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	17.314.560.000	42.492.060.000	25.177.500.000	145,41
3.2.1	Penyertaan modal (Investasi) daerah	11.000.000.000	11.000.000.000	-	-
3.2.2	Pembayaran pokok utang	500.000.000	25.677.500.000	25.177.500.000	5.035,50
3.2.3	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	5.814.560.000	5.814.560.000	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	22.035.980.488	21.858.480.488	(177.500.000)	(0,81)

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada pencapaian target Tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. Penyusunan prioritas daerah Tahun 2018 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan Tahun 2017 dan proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2018, masalah dan tantangan pembangunan yang merujuk pada prioritas pembangunan nasional, serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2018 tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019. RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 dalam rangka mewujudkan Visi jangka menengah Kabupaten Ciamis yaitu :

“ Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- Maju Berkualitas** : Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan daerah kedepan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan juga tidak hanya sekedar kuantitas tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.
- Kemandirian** : Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi. Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi tersebut menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan

daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI			
Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019			
MISI	TUJUAN	SASARAN	
Misi Pertama, Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia	Membangun sumber daya manusia yang terdidik	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas Meningkatnya budaya dan minat baca	
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya layanan kesehatan Meningkatnya kesehatan lingkungan	
	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	
	Meningkatkannya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	
	Meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah	Meningkatnya prestasi olahraga Pengembangan dan penguatan nilai budaya yang berkembang di masyarakat	
	Meningkatkan kerukunan hidup beragama	Pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari Mewujudkan harmonisasi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, inter umat beragama maupun antar umat beragama serta pengembangan toleransi terhadap keragaman agama	
	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial	Menurunnya tingkat kemiskinan Terlindunginya perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan Menurunnya PMKS	
	Misi Kedua, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas SDM aparat Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
		Meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya transparansi. Meningkatnya pelayanan masyarakat. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
		Meningkatnya kesadaran politik dan demokrasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
Meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum		Meningkatnya Kesadaran Hukum masyarakat Terciptanya supremasi hukum dan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) Terkendalnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	
Meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha (perindustrian dan perdagangan) dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah		Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi	
Misi Ketiga, Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
	Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air		
	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman		
	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan pembinaan usaha tambang		
	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan		
	Meningkatnya RTH yang dikelola Pemerintah		
	Meningkatakan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat		
Misi Keempat, Membangun perekonomian daerah yang tangguh	Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah	Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	
		Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	
		Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	
		Terwujudnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi unggulan lokal	
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana perekonomian masyarakat	
Meningkatkan daya beli	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya		

	masyarakat	disparitas pendapatan
	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan, perikanan dan kehutanan Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani
	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan
Misi Kelima, Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan	Meningkatkan layanan pemerintah desa kepada masyarakat	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan Menurunnya jumlah desa tertinggal
	Mewujudkan kemandirian masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan

Sumber : RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019

Pada Tahun 2018, Kabupaten Ciamis masih dihadapkan pada masalah dan tantangan yang memerlukan adanya arah kebijakan yang ditetapkan dengan mengacu pada permasalahan menonjol sebagai isu strategis, baik Nasional, Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Ciamis. Arah kebijakan ini merupakan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program-program kepala daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Arah kebijakan ini juga memperhatikan isu global yang berkembang yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan global yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) dengan 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Mengurangi Kesenjangan
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
13. Aksi Terhadap Iklim
14. Kehidupan Bawah Laut
15. Kehidupan di Darat
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan Tahun 2018 disusun berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2017 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2018. Selain itu, dalam penetapan prioritas ini juga memperhatikan tantangan dan isu pembangunan nasional Tahun 2018 serta isu strategis Provinsi Jawa Barat serta isu strategis Kabupaten Ciamis.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut **“Nawa Cita”**, yaitu:

- A. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- B. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- C. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- D. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- E. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- F. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- G. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- H. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- I. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam prioritas nasional dan program prioritas Tahun 2018, yaitu :

- I. Pendidikan
 - 1. Pendidikan Vokasi.
 - 2. Peningkatan kualitas guru.
- II. Kesehatan
 - 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - 2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
 - 3. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
- III. Perumahan dan Permukiman
 - 1. Penyediaan Perumahan Layak.
 - 2. Air Bersih dan Sanitasi.
- IV. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
 - 1. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10).
 - 2. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10).
 - 3. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14).
 - 4. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.
 - 5. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi.
- V. Ketahanan Energi
 - 1. EBT dan Konservasi Energi.
 - 2. Pemenuhan Kebutuhan Energi.
- VI. Ketahanan Pangan
 - 1. Peningkatan Produksi pangan.
 - 2. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi).
- VII. Penanggulangan Kemiskinan
 - 1. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran.
 - 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
 - 3. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.
- VIII. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
 - 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda).
 - 2. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika.

- IX. Pengembangan Wilayah
 - 1. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal.
 - 2. Pembangunan Perdesaan.
 - 3. Reforma Agraria.
 - 4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan).
 - 5. Percepatan Pembangunan Papua.
- X. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
 - 1. Penguatan Pertahanan.
 - 2. Stabilitas Politik dan Keamanan.
 - 3. Kepastian Hukum.
 - 4. Reformasi Birokrasi.

Perencanaan pembangunan nasional Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari RPJMN Tahun 2015-2019 dengan tema pembangunan Tahun 2018, yaitu:

”Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial secara luas dan sasaran wilayah dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan.

Perencanaan pembangunan nasional Tahun 2018 dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di Tahun 2018, antara lain meliputi:

- 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% (5,4% – 6,1%);
- 2. Laju inflasi sebesar 3,5+1%;
- 3. Angka kemiskinan sebesar 9,0-10,0%;
- 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3-5,5%

b. Arah Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menindaklanjuti kebijakan umum dan operasional pembangunan, mengarahkan pembangunan pada 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu:

- 1. Pembangunan berbasis sektoral melalui 10 (sepuluh) *Common Goals*, yaitu:
 - a. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
 - b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan.
 - c. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku.
 - d. Meningkatkan ekonomi pertanian.
 - e. Meningkatkan ekonomi non pertanian.
 - f. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan.

- g. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan, dan olahraga.
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan.
 - i. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan.
 - j. Modernisasi pemerintahan dan pembangunan perdesaan
2. Pembangunan berbasis Program dan Kegiatan Unggulan Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.66-Org/2014, yang akan disinergikan dan diwujudkan melalui Rencana Aksi Multipihak-Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
 3. Pembangunan berbasis kewilayahan, yang berdasarkan pada tata ruang, wilayah koordinasi pemerintahan pembangunan (WKPP) dan wilayah perbatasan antar provinsi.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Kabupaten Ciamis termasuk dalam Wilayah Pengembangan Priangan Timur-Pangandaran, dengan fokus dan rencana pengembangan yaitu:

- a. Fokus pengembangan

Kabupaten Ciamis diarahkan untuk kegiatan dan industri pengolahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan serta pertambangan mineral non logam.
- b. Rencana pengembangan WP Priangan Timur-Pangandaran
 - Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai, dan protein hewani)
 - Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
 - Peningkatan fungsi kawasan lindung.
 - Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - Pengembangan energi baru terbarukan.
 - Pengembangan pariwisata berbasis biodiversity.
 - Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana.
 - Penataan daerah otonom.
 - Pembangunan pusat seni dan budaya.
 - Peningkatan dukungan terkait rencana pembangunan Waduk Matenggeng.

Tematik kewilayahan berdasarkan Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) IV Priangan, dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor.
2. Mengembangkan kluster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak.

3. Mengembangkan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor.
4. Mengembangkan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata.
5. Mengembangkan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (*growth center*) Pangandaran dan Rancabuaya.

Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan provinsi mengacu pada rumusan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan rumusan kerjasama yaitu:

1. Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - a. Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah perbatasan, pelayanan penerimaan siswa baru, pembangunan RKB SMA/SMK dan pemberian beasiswa SMA/SMK.
 - b. Kesehatan, dengan fokus kerjasama penanganan penyakit menular dan bencana, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama penanganan keluarga miskin, serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya untuk kesehatan ibu dan anak.
 - c. Sosial, dengan fokus penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - d. Batas wilayah, dengan fokus perapatan dan perawatan pilar batas wilayah serta pembangunan dan pemeliharaan tugu batas/gapura.
 - e. Ketenteraman dan ketertiban, dengan fokus operasi bersama Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtramas) serta operasi bersama penegakan Perda.
2. Bidang Fisik
 - a. Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang kawasan strategis Jawa Tengah - Jawa Barat.
 - b. Pengelolaan sumber daya air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk, normalisasi serta operasional dan pemeliharaan (OP) sungai, rehabilitasi dan OP jaringan irigasi, konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan pengadaan tanah.
 - c. Infrastruktur jalan dan jembatan, dengan fokus pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan, penggantian dan pemeliharaan jembatan, serta pengadaan tanah.
 - d. Perhubungan, dengan fokus pengembangan moda transportasi publik massal dan keperintisan.
3. Bidang Ekonomi
 - a. Pariwisata, dengan fokus promosi bersama pariwisata.
 - b. Perdagangan, dengan fokus pelaksanaan tera dan tera ulang.

- c. Peternakan, dengan fokus penyediaan kebutuhan daging sapi lintas wilayah dan pengawasan lalu lintas ternak.
- d. Pertanian, dengan fokus penanganan bersama hama terpadu di wilayah perbatasan.

Sedangkan isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yaitu:

- A. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - 1. Ketahanan pangan;
 - 2. Kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 3. Pengangguran;
 - 4. Ketahanan keluarga.
- B. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi:
 - 1. Pemerataan, perluasan akses dan mutu pendidikan;
 - 2. Peningkatan kualitas, akses dan sistim pelayanan kesehatan;
 - 3. infrastruktur strategis, infrasturktur desa dan perdesaan.
- C. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi:
 - 1. Aksesibilitas, kualitas, daya saing, pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan;
 - 2. Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM);
 - 3. Prestasi pemuda dalam lingkup nasional dan internasional;
 - 4. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018;
 - 5. Akuntabilitas kinerja aparatur;
 - 6. Pengembangan destinasi wisata, pusat seni dan budaya serta gelanggang olahraga;
 - 7. Lingkungan hidup dan penataan ruang;

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- 1. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan;
- 2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan;
- 4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata;
- 5. Peningkatan Ketahanan Pangan;
- 6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri;
- 7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
- 8. Pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana;
- 9. Penanggulangan kemiskinan;
- 10. Peningkatan penataan ruang daerah;
- 11. Peningkatan Kualitas kependudukan;

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adalah:

“Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat”

c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018

Sejalan dengan kondisi di tingkat nasional dan kondisi Jawa Barat serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2016, maka isu strategis Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah :

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan pelaku usaha;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan;
5. Optimalisasi layanan kemiskinan;
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peningkatan pengelolaan pariwisata, seni , budaya, pemuda dan olahraga;
8. Peningkatan mitigasi bencana alam;
9. Optimalisasi kinerja Pemerintahan Daerah dan Desa;
10. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018;

Selain itu, terdapat pula Janji Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang pada Tahun 2018 juga akan menjadi fokus kegiatan Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah:

1. Membangun Unit Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Anggaran sebesar Rp 20 miliar bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi masyarakat tidak mampu.
3. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Ciamis.
4. Anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk pengembangan 10 Puskesmas rawat inap.
5. Revitalisasi pembangunan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
6. Anggaran sebesar Rp 9 miliar bantuan pendidikan ke SLTA (penuntasan wajib belajar 12 tahun).
7. Anggaran sebesar Rp 1 miliar penanggulangan siswa drop out.
8. Anggaran sebesar Rp 15 miliar bantuan pemberdayaan usaha bagi warga tak mampu.
9. Anggaran sebesar Rp 5 miliar bantuan rehab rumah tak layak huni.
10. Anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk pengaspalan (hot mix).
11. Anggaran sebesar Rp 15 miliar pembangunan dan rehabilitasi irigasi.
12. Anggaran sebesar Rp 28 miliar untuk bantuan aspal dan semen untuk perbaikan jalan desa.
13. Perbaikan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT).

14. Penanggulangan pengangguran melalui pelatihan usaha, kerja dan peningkatan keterampilan.
15. Bantuan Pemasangan Listrik Baru Bagi keluarga Tidak mampu.
16. Anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk Peningkatan Pendidikan Keagamaan. Bantuan kesejahteraan/insentif guru madrasah, RA, TKA, TPA dan DKM, Bantuan pesantren dan madrasah.
17. Revitalisasi Posyandu Rp 1 Miliar.
18. Reformasi Birokrasi, Peningkatan kualitas Pelayanan publik.
19. Penyelesaian masalah pertanahan.
20. Pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup.
21. Penataan Ibu Kota Kabupaten dan Kota Kecamatan.
22. Pengembangan wisata, kesenian dan olah raga, termasuk membangun gedung kesenian.

Untuk Tema Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah :

“Optimalisasi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan”

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 disusun melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis Tahun 2018. Prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018 adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas
 - b. Meningkatnya budaya dan minat baca
2. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya layanan kesehatan
 - b. Meningkatnya kesehatan lingkungan
3. Pengembangan pertanian dan perikanan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan
 - b. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian, peternakan dan perikanan
 - c. Berkembangnya berbagai aktivitas *off farm* untuk meningkatkan penghasilan petani
 - d. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan

- e. Peningkatan dan pemerataan akses sarana dan prasarana pertanian, kehutanan dan perikanan
 - f. Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh
4. Pengembangan pariwisata dan dunia usaha, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Pengembangan kepariwisataan
 - b. Pelestarian budaya daerah, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan
 - c. Pengembangan industri kecil dan menengah
 - d. Peningkatan kapasitas pelaku usaha
 - e. Pengembangan sentra industri
 - f. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
 - g. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - h. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan
 - i. Perbaikan iklim usaha investasi
5. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketenagakerjaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Menurunnya tingkat kemiskinan.
 - b. Menurunnya PMKS
6. Pemberdayaan masyarakat pengarusutamaan gender serta pemuda dan olahraga, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk
 - b. Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan
 - c. Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan
 - d. Meningkatnya prestasi olahraga.
 - e. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan atlet, serta kepemudaan.
7. Penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang
 - b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana
8. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten
 - b. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan sumber daya air
 - c. Penataan lingkungan perkotaan
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat

9. Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan
 - c. Penataan Sistem Hukum dan Penegakan hukum
 - d. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
 - f. Penataan Sistem Informasi pembangunan Daerah
 - g. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi
 - h. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
 - i. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
10. Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.
 - c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.
 - d. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Ciamis selama ini masih perlu difokuskan untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antar wilayah baik antar kabupaten/kota maupun antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 telah disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah melalui Sistem Pusat Kegiatan yaitu Sistem Perkotaan (Pusat Kegiatan Lokal-PKL) dan Pusat Pelayanan Kecamatan-PPK) dan Sistem Perdesaan, yaitu terdiri dari:

1. Sistem perkotaan meliputi:
 - a. PKL Ciamis sebagai pusat pelayanan skala kabupaten;
 - b. PKL Banjarsari sebagai pusat pelayanan wilayah tengah kabupaten;
 - c. PKL Kawali sebagai pusat pelayanan wilayah Utara Kabupaten;
 - d. PKL Cijeungjing sebagai pusat pelayanan wilayah Timur koridor Jalan Arteri Primer;
 - e. PKL Sindangkasih-Cikoneng sebagai pusat pelayanan wilayah Barat koridor Jalan Arteri Primer;
 - f. PKL Rancah sebagai pusat pelayanan wilayah Utara Timur;
 - g. PKL Panjalu sebagai pusat pelayanan wilayah Utara Barat;
 - h. PKL Pamarican sebagai pusat pelayanan wilayah tengah Barat;
 - i. PPK sebagai pusat pelayanan kecamatan meliputi Kecamatan Sadananya, Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan

Panawangan, Kecamatan Cipaku, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cidolog, dan Kecamatan Purwadadi.

2. Sistem perdesaan, berupa PPL meliputi:
 - a. Desa Karangpaningal berada di Kecamatan Panawangan;
 - b. Desa Tigaherang berada di Kecamatan Rajadesa;
 - c. Desa Buanamekar di Kecamatan Panumbangan;
 - d. Desa Patakarja berada di Kecamatan Rancah;
 - e. Desa Sukasari berada di Kecamatan Tambaksari;
 - f. Desa Pusakanagara berada di Kecamatan Baregbeg;
 - g. Desa Sidamulya, Sukahurip, dan Bangunharja berada di Kecamatan Cisaga;
 - h. Desa Pasirnagara dan Kertahayu berada di Kecamatan Pamarican;
 - i. Desa Cintajaya, Tambakreja, dan Desa Sidaharja berada di Kecamatan Lakbok;
 - j. Desa Padaringan dan Sidarahayu berada di Kecamatan Purwadadi;
 - k. Desa Ciulu, Kalijaya, dan Cigayam berada di Kecamatan Banjarsari (dan Kecamatan Banjaranyar saat ini).

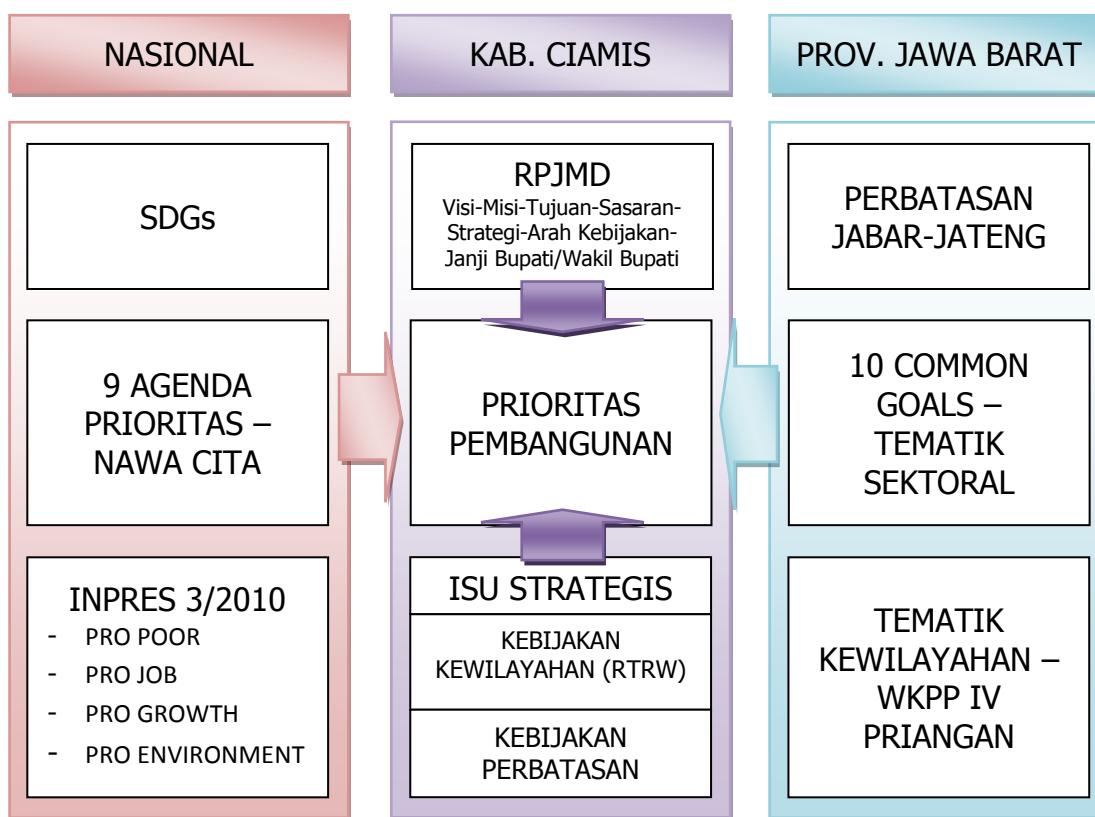
Sedangkan rencana pembangunan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dan bagi Kabupaten Ciamis dalam aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi telah ditetapkan melalui Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Ciamis, yaitu terdiri dari :

1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah.
2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Ciamis, yaitu:
 - 1) KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga, dengan kriteria kawasan yang memiliki kemampuan cepat tumbuh yang tinggi, kawasan yang berpotensi tumbuhnya berbagai kegiatan tanpa terkendalinya secara linear sepanjang koridor jalan arteri primer sebagai dampak kestrategisan jaringan jalan arteri primer, kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Ciamis. Isu penanganan yang harus dilakukan adalah mengakomodir kegiatan yang sesuai di sepanjang koridor, penataan pusat pemerintahan kabupaten dan kegiatan potensial lainnya di sepanjang koridor secara terintegrasi. Ruang lingkup wilayah meliputi Perkotaan Cihaurbeuti, Perkotaan Sindangkasih, Perkotaan Cikoneng, Perkotaan Ciamis, Perkotaan Cijeungjing dan Perkotaan Cisaga.
 - 2) KSK Situ Panjalu, dengan kriteria kawasan wisata unggulan yang memiliki potensi mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di bagian Utara Kabupaten Ciamis. Isu penanganan untuk pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan kawasan lindung sebagai obyek wisata yang handal. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Panjalu, Kecamatan Sukamantri.

- 3) KSK Agropolitan di Kecamatan Sukamantri, Panumbangan, Panjalu dan Cihaurbeuti, dengan kriteria kawasan yang memiliki potensi sebagai kawasan cepat tumbuh dan berkembang di sektor pertanian. Isu penanganan untuk penyediaan sarana dan prasarana kawasan agropolitan dan mewujudkan program-program kawasan agropolitan. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Panumbangan, Sukamantri, Panjalu, Cihaurbeuti dan Lumbung.
- 4) KSK Kawasan Perkotaan Kawali, dengan kriteria kawasan perkotaan yang dipersiapkan menjadi pusat kegiatan dan pertumbuhan di koridor kawasan paling utara Kabupaten Ciamis. Isu penanganan untuk pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang mampu memberikan pelayanan kegiatan secara optimal bagi kawasan utara Kabupaten Ciamis, dan pengembangan sarana prasarana ekonomi sesuai skala pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat paling Utara Kabupaten Ciamis.
- 5) KSK Kawasan Perkotaan Banjarsari, dengan kriteria kawasan perkotaan yang dipersiapkan untuk memiliki kemampuan sebagai penyangga pergerakan ke arah Kota Banjar. Isu penanganan berupa pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu menyangga pergerakan eksternal.
- 6) KSK Lumbung Padi, dengan kriteria kawasan yang memiliki potensi pertanian lahan basah (sawah) sebagai lumbung padi Kabupaten Ciamis. Isu penanganan berupa peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, mengendalikan alih fungsi lahan sawah, pengembangan perekonomian masyarakat dan penanganan kendala dan permasalahan penghambat pengembangan pertanian sawah. Ruang lingkup wilayah meliputi Kecamatan Banjarsari, Lakbok, dan Purwadadi.
- 7) KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara, dengan kriteria kawasan yang perlu didorong perekonomian masyarakat perbatasan dan kawasan yang membutuhkan penanganan bersama dengan kabupaten/kota perbatasan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kawasan perbatasan. Isu penanganan berupa pengembangan kegiatan dan infrastruktur yang mendukung perkembangan kawasan perbatasan dan terintegrasi dengan kabupaten/kota sekitar, dan koordinasi penanganan bersama dengan kabupaten/kota sekitar untuk mewujudkan struktur dan pola ruang perbatasan di masing-masing kabupaten/kota.
- 8) KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Barat, dengan kriteria kawasan yang perlu didorong perekonomian masyarakat perbatasan dan kawasan yang membutuhkan penanganan bersama dengan kabupaten/kota perbatasan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kawasan perbatasan. Isu penanganan berupa pengembangan kegiatan dan infrastruktur yang mendukung perkembangan kawasan perbatasan dan terintegrasi dengan kabupaten/kota sekitar, dan koordinasi penanganan bersama dengan kabupaten/kota sekitar untuk mewujudkan struktur dan pola ruang perbatasan di masing-masing kabupaten/kota.

Gambar 4.1.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Hasil yang ingin dicapai pada tahun 2018 dapat terlihat dari target Indikator Makro Pembangunan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2018

No.	Indikator	Target Awal		Target Penyesuaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,18 (metode lama)		69,36 (metode baru)	
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,52 (metode lama)	Tahun	7,73 (metode baru)	Tahun
	b. Angka Melek Huruf (AMH)	99,37	%	-	%
	c. Angka Harapan Lama Sekolah		%	14,66	%
	d. Angka Harapan Hidup (AHH)	68,22 (metode lama)	Tahun	70,55 (metode baru)	Tahun
	e. Daya Beli Masyarakat	642.640,- (metode lama)	Rp.	8.326.400 (metode baru)	Rp.
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,05	%	-	%
3	Persentase Penduduk Miskin	6,97	%	7,35	%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,32	%	5,21	%

Sumber: RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019

4.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan dan target indikator makro Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah berjumlah 171 program yang terbagi ke dalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 Urusan Pilihan, 5 Urusan Penunjang Pemerintahan, 4 Urusan Pendukung, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kewilayahan dan Non Urusan, yaitu:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

(1) Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI);
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
5. Program Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

(2) Kesehatan

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
4. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ;
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
6. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD;
7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
14. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan.

(3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. Program Pembangunan turap/talud/bronjong;
4. Program Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan;
5. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 7. Program Pengendalian Banjir;
 8. Program Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan;
 9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
 10. Program Perencanaan Tata Ruang;
 11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 12. Program Pemanfaatan Ruang;
 13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
- (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 2. Program Pengembangan Perumahan;
 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
 4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
 5. Program Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan.
- (5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 4. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
- (6) Sosial
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya;
 2. Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 3. Program Pembinaan Anak Terlantar;
 4. Program Pembinaan Panti Asuhan atau Panti Jompo;
 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- (1) Tenaga Kerja
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
 2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
 3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
 2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
 3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

- (3) Pangan
 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
 2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat.
- (4) Pertanahan
 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.
- (5) Lingkungan Hidup
 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam;
 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 5. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
 6. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- (7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 1. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1. Program Keluarga Berencana;
 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
 3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan Konseling.
- (9) Perhubungan
 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
 2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- (10) Komunikasi dan Informatika
 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
 2. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media.
- (11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- (12) Penanaman Modal
 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.
- (13) Kepemudaan dan Olahraga
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;
 3. Program Pembinaan Kepemudaan;
 4. Program Kepemudaan dan Olahraga;
 5. Program peningkatan peran serta kepemudaan.
- (14) Statistik
1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah.
- (15) Persandian
1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (16) Kebudayaan
1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
 3. Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
- (17) Perpustakaan
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
- (18) Kearsipan
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
 2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
 3. Program Pembinaan Arsip Statis.

C. Urusan Pilihan

- (1) Kelautan dan Perikanan
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
 2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- (2) Pariwisata
1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 2. Program Pengembangan Kemitraan;
 3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- (3) Pertanian
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
 3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
 4. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan;
 6. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
 7. Program peningkatan produksi, produktivitas hortikultura ramah lingkungan;

8. Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan;
 9. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;
 10. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian;
 11. Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan;
 12. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
 13. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Hewan/ternak;
 14. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
 15. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;
 16. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
 17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Perikanan.
- (4) Kehutanan
 - (5) Energi dan Sumber Daya Mineral
 - (6) Perdagangan
 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - (7) Perindustrian
 1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - (8) Transmigrasi
 1. Program Pengembangan Kapasitas Calon Transmigran;
 2. Program Transmigrasi Regional.

D. Urusan Penunjang Pemerintahan

- (1) Inspektorat
 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
- (2) Perencanaan
 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- (3) Keuangan
 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Kepegawaian
 1. Program Fasilitasi pindah/Purna tugas PNS;
 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

- (5) Pendidikan dan Pelatihan
 - 1. Program Pendidikan Kedinasan;
 - 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
- (6) Penelitian dan Pengembangan
 - 1. Program Pengembangan data/informasi.

E. Pendukung

- (1) Sekretariat Daerah
 - 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /WKDH;
 - 2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota;
 - 3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - 4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
 - 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
 - 7. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian;
 - 8. Program Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan;
 - 9. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah;
 - 10. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa;
 - 11. Program Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH;
 - 12. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
 - 13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- (2) Sekretariat DPRD
 - 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

F. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
- 4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

G. Kewilayahan

- 1. Program Penataan Daerah Otonom.

H. Non Urusan

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 3. Program peningkatan disiplin aparatur;
- 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Selanjutnya prioritas pembangunan daerah dijelaskan ke dalam program dengan target indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2018 sebagaimana tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3

Penjelasan Program Pembangunan

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Partisipasi anak usia dini dalam PAUD	52	%
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1 di tingkat pendidikan dasar dan menengah	94	%
			kompetensi sumberdaya manusia (pendidik)	5.390	guru
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan	98	%
			Jumlah guru yang bersertifikasi	13.816	guru
			Meningkatnya kapasitas komite sekolah	200	sekolah
			Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif	820	sekolah
			kerjasama kelembagaan bidang pendidikan	7	lembaga
			Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Fasilitasi penyelenggaraan paket A, B dan C	40
		Akreditasi lembaga kursus dan keterampilan		10	lembaga
		Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan Non formal		60	lembaga
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	105.41	%
			Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	98.62	%
			Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	99.02	%
			Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	97.07	%
			Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana	45	%
			kelulusan UN siswa kelas 6 SD/MI	100	%
			kelulusan UN siswa kelas 3 SMP/Mts	100	%

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Jumlah bantuan Siswa yang berkebutuhan khusus	20	siswa
	Meningkatnya budaya dan minat baca	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya koleksi bahan pustaka	41.339	Eksemplar
			Meningkatnya pengunjung perpustakaan	29.165	orang
Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatnya layanan kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat untuk 37 PKM	100	%
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	rasio puskesmas/Pustu/Pokesdes	0.038	%
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	puskesmas
			kepuasan pengunjung puskesmas	86	%
			Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di rumah sakit	16	jenis pelayanan
		Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya sediaan layanan kesehatan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit	96	%
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100	%
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	jumlah kunjungan pasien umum dan BPJS	110.000	Kunjungan
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan spesialistik	29	dokter spesialis
			Jumlah kunjungan BPJS	242.222	Kunjungan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa /kelurahan siaga aktif (SPM)	65	%		

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Penyuluhan masyarakat Pola hidup sehat	70	%
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kunjungan ibu hamil keempat kali telah mendapat pelayanan sesuai standar kebidanan (K4) (SPM)	92	%
			Persalinan oleh tenaga kesehatan (SPM)	92	%
			Kunjungan neonatus (bayi baru lahir umur 0 - 28 hari)	93	kunjungan
			Kunjungan bayi (umur 29 hari - 11 bulan) (SPM)	93	kunjungan
			Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kab/Kota	100	%
			Cakupan peserta aktif KB (SPM)	80	%
			Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/ dokter kecil (SPM)	100	%
			Puskesmas menjalankan deteksi dini pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular	37	Puskesmas
			Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat	54	%
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	275626	orang
			Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	2052	orang

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi kasus HIV	<0,5	per 1000 pddk
			desa/Kelurahan UCI (SPM)	100	%
			desa/Kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam (SPM)	100	kejadian
			Surveilans penyakit menular dan tidak menular	265	Desa/ kelurahan
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	balita
	Meningkatnya kesehatan lingkungan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Akses Jamban	67.3	%
			Akses Air Bersih	80.9	%
		Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat	54	desa/ kelurahan	
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	jumlah fasilitas industri rumah tangga yang terdaftar	77	IRT
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	cakupan promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap PHBS paska perawatan di rumah sakit	100	%
Pengembangan pertanian dan perikanan	Terjaminnya lahan pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	luas lahan sawah baru	50	Ha
			Ketersediaan energi dan protein per kapita	95	%
			Penguatan cadangan pangan	80	%
			Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	90	%
			Stabilisasi harga dan pasokan	90	%
			Pencapaian skor pola pangan harapan	90	%
			Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	75	%
			Penanganan daerah rawan pangan	75	%

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Terselenggaranya pameran HKP, HPS dan Rapat koordinasi DKP Tk Kab, Prov, Nas	9	Kegiatan
Meningkatkannya produksi dan produktivitas komoditi pertanian , peternakan, perikanan dan kehutanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian/perkebunan	jumlah prasarana yang diperbaiki (JITUT/JIDES)	3000	Ha	
		panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik	19.22	km	
	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Terealisasinya penerimaan dana bagi hasil provisi sumber daya hutan	1,1 Milyar	Rupiah/tahun	
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	jumlah produksi komoditi pertanian			
		- Padi	450.622	ton	
		- Jagung	22.429	ton	
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura	produktivitas komoditi hortikultura	592.757	ton	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan	jumlah kejadian penyakit pada ternak	1	kasus	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah ternak yang di IB	1.186	ekor	
	Program PSDS dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan halal	jumlah produksi daging sapi	1,164.56	ton	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Kejadian penyakit hewan	1	Kasus		
Berkembangnya berbagai aktivitas off farm untuk meningkatkan penghasilan petani	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Kehilangan hasil panen (losses)	0.2	%	
		Jumlah Kemitraan	5	unit	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	jumlah promosi hasil pertanian/perkebunan	5	kali	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	jumlah petani yang terlatih kegiatan	22	Kelompok
		Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah kegiatan promosi peternakan	4	kali
		Program Peningkatan Pemasaran Hasilproduksi Peternakan dan perikanan	Jumlah kegiatan promosi peternakan	4	kali
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi ikan	78,541	ton
		Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Perikanan	150	orang
			Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri	161	Kelompok
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	jumlah promosi hasil pertanian/perkebunan	5	kali
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah kegiatan promosi peternakan	4	kali
	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, sistem informasi dan kelembagaan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	luas lahan sawah baru	50	Ha
			Ketersediaan energi dan protein per kapita	95	%
			Penguatan cadangan pangan	80	%
			Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	90	%
			Stabilisasi harga dan pasokan	90	%
			Pencapaian skor pola pangan harapan	90	%
			Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	75	%
			Penanganan daerah rawan pangan	75	%
			Terselenggaranya pameran HKP, HPS dan Rapat koordinasi DKP Tk Kab, Prov, Nas	9	Kegiatan

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
	Peningkatan dan pemerataan akses sarana dan prasarana pertanian, kehutanan dan perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan	jumlah prasarana yang diperbaiki (JITUT/JIDES)	3000	Ha
	Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Perikanan	150	orang
			Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri	161	Kelompok
Pengembangan pariwisata dan dunia usaha	Pengembangan kepariwisataan	Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Jumlah pelaku sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif sektor EKSB	100	orang
		Program Pengembangan Kemitraan	jumlah kerjasama perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	2	dokumen
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	6	Wilayah
			Jumlah hotel	13	unit
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah kunjungan wisata	600	orang
		Pelestarian budaya daerah, peninggalan sejarah dan kepurbakalaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	jumlah grup kesenian	503
	Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		Apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah.	104	penghargaan
			Terselenggaranya gelar karya dan kreatifitas seni budaya daerah	22	event
			Jumlah situs	336	situs
	Pengembangan industri kecil dan menengah	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	32	jenis komoditi
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	jumlah IKM yang memiliki hak paten	13	IKM
		Program Pengembangan	Jumlah IKM	9413	Unit

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Industri Kecil dan Menengah	jumlah kluster industri	2	kluster
Peningkatan kapasitas pelaku usaha	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pameran produk unggulan	6	kali
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terbangunnya sistem informasi investasi	1	sistem
			Lama proses Perijinan	10	hari
		program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	dokumen potensi daerah	1	dokumen
Pengembangan sentra industri	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	32	jenis komoditi
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	jumlah IKM yang memiliki hak paten	13	IKM
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM	9413	Unit
			jumlah kluster industri	2	kluster
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Jumlah usaha skala mikro	2740	unit	
		jumlah usaha skala kecil	1366	unit	
		Jumlah usaha skala menengah	27	unit	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah koperasi yang mendapat dukungan permodalan	43	koperasi	
		Jumlah kelompok yang mendapat permodalan	261	kelompok	
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	351	unit	
Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Inspeksi Produk	5	kali	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya pasar penda yang layak	3	pasar	
		Tersedianya pasar desa yang layak	17	pasar	
		jumlah toko modern	60	unit	
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	jumlah sarana prasarana PKL dan asongan	23	lokasi		

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
	Perbaiki iklim usaha investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pameran produk unggulan	6	kali
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terbangunnya sistem informasi investasi	1	sistem
			Lama proses Perijinan	10	hari
		program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	dokumen potensi daerah	1	dokumen
Penanggulang an kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerja an	Menurunnya tingkat kemiskinan.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Persentase PMKS, KAT dan fakir miskin skala kabu- paten yang mem- peroleh bantuan sosial	1585	Orang
		Program Pengembangan kapasitas calon transmigran	Jumlah calon transmigran yang dibina	800	KK
		Program Transmigrasi Regional	Jumlah transmigran Regional	80	KK
	Menurunnya PMKS.	Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	1585	orang
			Peningkatan kualitas pe- nanganan PMKS & PSKS	40	%
		Program Pembinaan Anak Terlantar	Peningkatan kualitas pembinaan anak jalanan	24	%
		Program Pembinaan Panti Asuhan atau Panti jompo	Meningkatnya manajemen panti sosial	98	panti
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelemba- gaan kesejahteraan sosial yang dibina	75	lembaga
		program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam	jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana	210	orang
		Pemberdayaa n masyarakat , pengarustama an gender serta pemuda dan olahraga	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS peserta KB aktif
cakupan penyediaan data mikro keluarga setiap tahunnya	100				%
cakupan ketersediaan alat dan obat KB	100				%

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
			Cakupan BKB/BKR/BKL terbina	75	%
			Jumlah Jiwa Perkeluarga	3.12	Orang
			Jumlah UPPKS yang mendapat modal	274	Kelompok
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	19.8	Tahun
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling	Jumlah PPKS tingkat kecamatan	2	kelompok
	Meningkatnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	117	kali
		Pogram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Kewirausahaan pemuda	57	orang
	Meningkatnya peran perempuan dalam berpolitik/kemasyarakatan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	15.14	%
			Partisipasi angkatan kerja perempuan	2	%
			Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100	%
	Meningkatnya prestasi olahraga.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga	160	unit
			Jumlah lapangan olahraga	1.021	unit
		Program Pembinaan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	14	orang
			Jumlah klub olahraga	89	klub
	Pengembangan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan atlet, serta kepemudaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga	160	unit
			Jumlah lapangan olahraga	1.021	unit
		Program Pembinaan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	14	orang
			Jumlah klub olahraga	89	klub
Penanggulangan bencana	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	Program perencanaan tata	Jumlah rencana tata ruang	10	dokumen

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
dan pengelolaan lingkungan hidup,	penataan ruang	ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya	50	Buah
			Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	2	dokumen
		Program pengendalian pemanfaatan ruang	Pengendalian alih fungsi lahan	0,014	%
		Program Pemanfaatan ruang	Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang	100	%
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kampung iklim yang dikembangkan	12	kampung
			Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	100
		Pelayanan pencegahan pencemaran air		100	%
		Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak		100	%
		Jumlah bank sampah/Sarana pengelolaan sampah 3R		15	unit
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/berwawasan Adiwiyata	28	sekolah
			Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	20	%
		Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan	1,41	%
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	10,78	%
		Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Luasan taman hijau/koleksi tumbuhan local yang langka	0	ha
			Jumlah lubang resapan biopori	11	unit

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Jumlah sumber mata air yang direhabilitasi	1	buah
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana	program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam	jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana	210	orang
		Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	12,33	%
			Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK (wilayah manajemen kebakaran)	91,6	%
			Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (orang)	15	orang
			Persentase cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar layak pakai	23,03	%
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten wilayah	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	321,52	km
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	581,1	km
		Program pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	581,1	km
		Program pembangunan sistem informasi /Database jalan dan jembatan	Sistem informasi /data base jalan	60	%
		Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah alat berat dalam kondisi baik	62	unit
		Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Agropolitan dalam kondisi baik	232,68	km
			Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Lumbung Padi dalam kondisi baik	223	Km
		Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan sumber daya air	Program pengembangan sumber daya mineral dan air tanah	Jumlah sumur bor	4

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	22.256	m/Ha
			Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	72,1	%
		Program pengendalian banjir	Panjang saluran/sungai yang dinormalisasi	2,5	m
			Panjang bangunan proteksi sungai	10.381,21	M
	Penataan lingkungan perkotaan	Program pembangunan jalan lingkungan permukiman perkotaan	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam kondisi baik	224,3	km
			Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Panjang drainase yang belum terbangun	26.059
		Panjang drainase yang dipelihara		500	m
	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	11,34		%	
	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas	390	unit
			Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah halte	14
		Jumlah Terminal dalam kondisi baik		12	unit
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah uji KIR angkutan umum	3.144	unit
			Jumlah uji KIR angkutan tidak umum	6.632	unit
			Lama pengujian kelaikan kendaraan	22	menit
Biaya pengujian kelaikan kendaraan			45.000 s/d 140.000	rupiah	
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		Jumlah alat uji yang berfungsi	10	unit	
Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah izin dan pembaharuan trayek	658	ijin		
Meningkatkan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan struktural, teknis dan fungsional bagi PNS dan non PNS	1240	orang

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	300	orang
		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah tugas dan pensiun	932	orang
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	jumlah pengelolaan data kepegawaian dan rencana pengembangan karier aparatur	2	kegiatan
			jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	1.615	orang
	Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan				
	Pentaan Sistem Hukum dan Penegakan hukum	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan daerah :		
			- Perda	10	buah
			- Perbup	10	buah
			- SK	582	buah
			- Perjanjian	10	buah
	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya APBD	2 trilyun	Rp
	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah pertemuan dengan dunia usaha	3	kali
		Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya fasilitas persiapan kerjasama daerah dan batas daerah kab ciamis	3	lokasi
		Program Kerjasama pembangunan	Jumlah seminar	3	kali
	Penataan Sistem Informasi pembangunan Daerah	Program Pengembangan data/ informasi	Jumlah dokumen pengembangan data	1	dokumen
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah website pemerintah daerah	1	website
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	993	lembar
	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (kearsipan)	Jumlah pengamanan arsip vital/arsip aset pemerintah daerah	2	dokumen kegiatan

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya APBD	2 triliun	Rp
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersusunnya dokumen pemenuhan data dan informasi	5	dokumen
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	4	dokumen
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi	2	dokumen
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	1	dokumen
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	1	dokumen
		program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	aparat perencana yang terlatih	60	orang
		program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	jumlah dokumen penanggulangan bencana		dokumen
			Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan tanah	1	kecamatan
		Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah pertemuan dengan dunia usaha	4	kali
		Program pengembangan data/informasi	Jumlah dokumen pengembangan data	1	dokumen
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah penyediaan tanah pemda	5	buah
		Program Penataan penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan	11	dokumen
		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian kasus tanah pemda	3	kajian
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah website pemerintah daerah	1	website

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	terfasilitasi kegiatan KDH/WKDH	100	%
		Program Penataan Daerah Otonom	Terfasilitasi kegiatan kewilayahan di kecamatan	27	kecamatan
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah entitas yang diperiksa	350	entitas
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	jumlah AKIP/pejabat fungsional yang bersertifikat/mengikuti bimtek	70	orang
		Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	jumlah SOP, DMA, DMP dan kebijakan pengawasan yang diterbitkan	7	dokumen
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	terpeliharanya dokumen arsip daerah	63	SKPD
		Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan	terfasilitasinya kegiatan keprotokolan	10	kegiatan
		program penataan daerah otonom	terfasilitasinya kegiatan kecamatan dan kelurahan	100	%
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	28	Perda
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas serta profesionalisme aparatur	100	%
			IKM terhadap pelayanan perijinan	74.5	point
			IKM terhadap pelayanan publik	86	persen
		Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya koordinasi bidang perekonomian	4	kali

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan		Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah	terfasilitasinya dan terkoordinasinya pembangunan daerah	100	%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi bak	6	%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	4	dokumen
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi	2	dokumen
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	1	dokumen
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	1	dokumen
		program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	aparatus perencanaan yang terlatih	60	orang
		program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	jumlah dokumen penanggulangan bencana		dokumen
			Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan tanah	1	kecamatan
		Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah pertemuan dengan dunia usaha	4	kali
		Program Pengembangan data/ informasi	Jumlah dokumen pengembangan data	1	dokumen
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KK	100
	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah pembinaan di tingkat desa	2	kali
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	2	desa	
		Jumlah Aparatur Desa Yang dibina	30	orang	
		Pembinaan dan Pelatihan BPD	100	orang	
		Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	100	kali	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa	Jumlah ADD	48 milyar	rupiah		
Pembangunan Perdesaan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD				

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan	Kinerja		
			Indikator	Target	Satuan
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Desa.	Terfasilitasi dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa	100	persen
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pedesaan	persentase kantor desa dengan kondisi baik	81,4	%
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	45	lembaga
Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan			69 Milyar	rupiah	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1	kali	
Penguatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	4	BUMDes	
		UPK Yang terbina	26	Kelompok	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terfasilitasinya BBGRM, TMMG dan BSMSS	69 Milyar	rupiah	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 yang kemudian mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018, perubahan penjabaran tersebut dalam rangka mengakomodir adanya penambahan pendapatan yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah maka disusun Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan dan penyelenggaraan urusan yang harus disesuaikan pada program dan kegiatan masing-masing urusan. Rekomendasi hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 perlu ditindaklanjuti dengan adanya perubahan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan dan penambahan kegiatan baru, dikarenakan adanya penambahan sumber pendanaan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Jumlah usulan anggaran pada perubahan RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2018, dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebesar Rp 2.241.309.684.485,- yang direncanakan untuk membiayai 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 5 urusan penunjang pemerintahan, 4 urusan pendukung, serta Non Urusan. Rekapitulasi anggaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Per OPD sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Anggaran Pada
Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Per OPD

NO	OPD	ANGGARAN			
		APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI	APBN	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	22.293.332.000	481.200.000	16.377.091.000	39.151.623.000
2	Dinas Kesehatan	80.809.905.865	33.346.107.200	32.236.468.000	146.392.481.065
3	Rumah Sakit Umum Daerah	165.952.310.000	59.000.000.000	13.371.150.000	238.323.460.000
4	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan	981.744.604.460	161.350.000.000	19.560.000.000	1.162.654.604.460
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	58.004.542.000	21.650.000.000	9.352.392.000	89.006.934.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	25.122.115.800	8.834.894.800		33.957.010.600
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.586.884.000			2.586.884.000
8	Dinas Sosial	84.847.348.815	53.283.807.000	27.089.541.815	165.220.697.630
9	Dinas Tenaga Kerja	5.318.660.000			5.318.660.000
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.782.450.000	267.324.000		2.049.774.000
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.822.315.000	15.083.132.500		21.905.447.500
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.523.546.115	8.720.510.000	3.389.884.865	25.633.940.980
13	Dinas Perhubungan	33.371.000.000	5.000.000.000		38.371.000.000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.268.350.000			2.268.350.000
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	5.588.400.000		4.150.056.000	9.738.456.000
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.493.050.000	9.520.620.000		11.013.670.000
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	4.352.240.000			4.352.240.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.185.790.000	900.000.000		3.085.790.000
19	Dinas Pariwisata	3.706.460.000	750.000.000	5.244.636.000	9.701.096.000
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.502.285.000	34.982.278.750	110.641.265.500	152.125.829.250
21	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.910.441.000	3.900.000.000	1.207.979.000	8.018.420.000
22	Inspektorat	6.150.000.000	150.000.000		6.300.000.000
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.050.420.000	400.000.000		7.450.420.000
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				-
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.782.000.000			5.782.000.000
26	Sekretariat Daerah	21.223.300.000	600.000.000		21.823.300.000
27	Sekretariat DPRD	17.731.700.000			17.731.700.000
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.986.230.000			1.986.230.000

NO	OPD	ANGGARAN			
		APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI	APBN	JUMLAH
29	Kecamatan Ciamis	1.684.470.000			1.684.470.000
30	Kecamatan Baregbeg	279.470.000			279.470.000
31	Kecamatan Sadananya	265.850.000			265.850.000
32	Kecamatan Cikongeng	253.720.000			253.720.000
33	Kecamatan Sindangkasih	273.823.000			273.823.000
34	Kecamatan Cijeungjing	265.940.000			265.940.000
35	Kecamatan Cimaragas	303.190.000			303.190.000
36	Kecamatan Cidolog	260.080.000			260.080.000
37	Kecamatan Cihaurbeuti	368.510.000			368.510.000
38	Kecamatan Panumbangan	385.886.000			385.886.000
39	Kecamatan Panjalu	271.280.000			271.280.000
40	Kecamatan Sukamantri	265.020.000			265.020.000
41	Kecamatan Kawali	259.012.000			259.012.000
42	Kecamatan Lumbung	268.050.000			268.050.000
43	Kecamatan Panawangan	443.466.000			443.466.000
44	Kecamatan Cipaku	296.720.000			296.720.000
45	Kecamatan Jatinagara	248.380.000			248.380.000
46	Kecamatan Rajadesa	283.594.000			283.594.000
47	Kecamatan Rancah	281.020.000			281.020.000
48	Kecamatan Tambaksari	349.914.000			349.914.000
49	Kecamatan Cisaga	333.678.000			333.678.000
50	Kecamatan Sukadana	256.730.000			256.730.000
51	Kecamatan Lakbok	364.739.000			364.739.000
52	Kecamatan Purwadadi	278.120.000			278.120.000
53	Kecamatan Pamarican	297.100.000			297.100.000
54	Kecamatan Banjarsari	243.504.000			243.504.000
55	Kecamatan Banjaranyar	278.400.000			278.400.000
	JUMLAH	1.580.469.346.055	418.219.874.250	242.620.464.180	2.241.309.684.485

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2017. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II, menunjukkan bahwa RKPD tersebut perlu adanya penyesuaian. Penyesuaian dimaksud meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, pergeseran pagu antar SKPD, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 memuat perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Hal ini bertujuan agar pembangunan daerah Tahun 2018 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2018 juga mempertimbangkan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, untuk merumuskan kebijakan anggaran berbasis program secara efektif dan efisien.

Pada dasarnya Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2018 dilakukan dalam upaya mengefektifkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ciamis selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan, juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan permasalahan serta mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Ciamis sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

BUPATI CIAMIS,

